



**dpmpptsp
aceh**

2022

INDEKS DAYA SAING INVESTASI KABUPATEN/KOTA SE-ACEH

Secara keseluruhan nilai indeks daya saing investasi 23 Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021. Peringkat daya saing keseluruhan Kabupaten/Kota di Aceh yang diukur dari empat lingkup. Dapat dilihat rentang total nilai dari yang terendah sebesar -1,179 sampai yang tertinggi sebesar 1,678.



www.dpmpptsp.acehprov.go.id





 dpmpptspaceh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Tim Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P2IPM) - DPMPTSP Aceh dapat menyelesaikan Dokumen Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2022. Shalawat serta salam kami haturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi bagi para pemimpin sebagai pengambil kebijakan pembangunan melalui sunnah-Nya dalam membangun negeri melalui semangat peradaban madani.

Laporan IDSI diharapkan dapat memberikan hasil pemetaan tingkat daya saing investasi dan menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk percepatan, peningkatan, dan pemerataan investasi Aceh melalui semangat Investasi Hijau atau konsep Green Investment yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas ekosistem sebagai kearifan lokal Aceh.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pengumpulan dan pengisian data IDSI sampai dengan penyusunan dokumen IDSI Tahun 2022, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan.

Laporan IDSI Kabupaten/Kota se-Aceh mungkin masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyediaan data, maupun analisa mendalam. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menjadi bahan perbaikan bagi kesempurnaan dokumen di masa mendatang.

Demikian dokumen ini disusun untuk kepentingan bersama. Semoga investasi dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan daya saing yang berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Banda Aceh, 01 November 2022

Marthunis, ST, DEA

Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	
PENGANTAR	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah:	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Kerangka Pemikiran	3
1.5. Metodologi	5
BAB II	
ANALISA PERINGKAT DAYA SAING INVESTASI	11
2.1. Daya Saing Investasi Keseluruhan Kabupaten dan Kota se Aceh	11
2.2. Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota	13
1. Kabupaten Simeulue	13
2. Kabupaten Aceh Singkil	18
3. Kabupaten Aceh Selatan.....	22
4. Kabupaten Aceh Tenggara.....	27
5. Kabupaten Aceh Timur.....	32
6. Kabupaten Aceh Tengah.....	37
7. Kabupaten Aceh Barat	42
8. Kabupaten Aceh Besar	47
9. Kabupaten Pidie.....	52
10. Kabupaten Bireuen.....	57
11. Kabupaten Aceh Utara.....	62
12. Kabupaten Aceh Barat Daya.....	67
13. Kabupaten Gayo Lues	72
14. Kabupaten Aceh Tamiang	77
15. Kabupaten Nagan Raya.....	82



16. Kabupaten Aceh Jaya	86	
17. Kabupaten Bener Meriah	91	
18. Kabupaten Pidie Jaya	96	
19. Kota Banda Aceh.....	101	
20. Kota Sabang	106	• • • •
21. Kota Langsa	111	• • • •
22. Kota Lhokseumawe.....	116	• • • •
23. Kota Subulussalam.....	120	
BAB III		
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	126	
3.1. Kesimpulan.....	126	
3.2. Rekomendasi.....	127	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daya Saing Investasi Kabupaten Kota di Aceh Tahun 2022.....	11
Tabel 2.2	Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota se Aceh 2019-2022.....	12
Tabel 2.3	Peringkat Daya Saing Kabupaten Simeulue.....	14
Tabel 2.4	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Simeulue.....	16
Tabel 2.5	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Singkil.....	19
Tabel 2.6	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Singkil.....	21
Tabel 2.7	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Selatan.....	23
Tabel 2.8	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Selatan.....	25
Tabel 2.9	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Tenggara.....	28
Tabel 2.10	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Tenggara.....	30
Tabel 2.11	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Timur.....	33
Tabel 2.12	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Timur.....	35
Tabel 2.13	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Tengah.....	38
Tabel 2.14	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Tengah.....	40
Tabel 2.15	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Barat.....	43
Tabel 2.16	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat.....	45
Tabel 2.17	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Besar.....	48
Tabel 2.18	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Besar.....	50

Tabel 2.19	Peringkat Daya Saing Kabupaten Pidie	53
Tabel 2.20	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Pidie	55
Tabel 2.21	Peringkat Daya Saing Kabupaten Bireuen.....	58
Tabel 2.22	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Bireuen.....	60
Tabel 2.23	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Utara.....	62
Tabel 2.24	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Utara.....	65
Tabel 2.25	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Barat Daya	67
Tabel 2.26	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat Daya	70
Tabel 2.27	Peringkat Daya Saing Kabupaten GayoLues.....	72
Tabel 2.28	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Gayo Lues.....	75
Tabel 2.29	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Tamiang	78
Tabel 2.30	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Tamiang.....	80
Tabel 2.31	Peringkat Daya Saing Kabupaten Nagan Raya.....	83
Tabel 2.32	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Nagan Raya	85
Tabel 2.33	Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Jaya	87
Tabel 2.34	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Jaya	89
Tabel 2.35	Peringkat Daya Saing Kabupaten Bener Meriah	92
Tabel 2.36	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Bener Meriah	94
Tabel 2.37	Peringkat Daya Saing Kabupaten Pidie Jaya	97

Tabel 2.38	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Pidie Jaya.....	99
Tabel 2.39	Peringkat Daya Saing Kota Banda Aceh.....	101
Tabel 2.40	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Banda Aceh.....	104
Tabel 2.41	Peringkat Daya Saing Kota Sabang.....	107
Tabel 2.42	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Sabang.....	107
Tabel 2.43	Peringkat Daya Saing Kabupaten Kota Langsa.....	112
Tabel 2.44	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Langsa.....	114
Tabel 2.45	Peringkat Daya Saing Kabupaten Kota Lhokseumawe	117
Tabel 2.46	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Lhokseumawe	117
Tabel 2.47	Peringkat Daya Saing Kabupaten Subulussalam.....	121
Tabel 2.48	Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Subulussalam	124

BAB I

PENGANTAR

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Seluruh provinsi di Indonesia memiliki ragam potensi dan sumber daya alam (SDA) yang sama menariknya. Namun, daya tarik investasi tetap menjadi penentu bagi pelaku usaha sebagai destinasi investasi untuk berlabuh. Selain beberapa faktor pendukung lainnya, meliputi ketersediaan proyek-proyek investasi yang bersifat *clean and clear* sesuai karakteristik SDA yang siap untuk ditawarkan kepada investor, iklim investasi daerah yang kondusif, ketersediaan infrastruktur pendukung sebagai konektivitas dan indeks daya saing (*competitiveness*) investasi yang akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi.

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan adalah melalui kegiatan investasi. Investasi merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha dan mengembangkan usaha mereka di wilayah negara Republik Indonesia.

Tingkat daya saing (*competitiveness*) menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan bagaimana iklim investasi suatu daerah dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin kondusif pula iklim investasi yang tercipta, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Daya saing menjadi landasan dasar bagi setiap daerah yang memiliki target untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada. Saat ini, menjadi sangat penting bagi suatu daerah yang sedang berkembang untuk mengukur daya saingnya dalam rangka mengevaluasi strategi pembangunan ekonomi daerah. Indeks daya saing merupakan alat ukur yang tepat yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI) untuk Tahun 2020 Aceh menduduki peringkat daya saing ke 26 dari 4 Provinsi di Indonesia. Peringkat ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Aceh yang saat ini sedang giat-giatnya berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya ditempuh dengan mendorong kegiatan investasi, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur tentang otonomi khusus sudah seharusnya menjadi landasan bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk secara mandiri merancang strategi untuk meningkatkan daya saing daerah. UUPA membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil berbagai kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah dan membuka peluang untuk persaingan sehat dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten/Kota menuju pertumbuhan yang inklusif.

Dengan paradigma ini, pemerintah kabupaten/kota wajib memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing di daerah. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk memahami dan bertindak berdasarkan kekuatan dan kelemahan potensi Kabupaten/Kota di sekitarnya.

1.2. Identifikasi Masalah:

Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi terkait daya saing investasi di Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Diperlukan pengukuran indeks daya saing di daerah sebagai acuan dalam membuat kebijakan terkait perumusan kebijakan peningkatan daya saing daerah;
- 2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki visi dan persepsi yang sama dalam merumuskan strategi peningkatan daya saing pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
- 3) Belum tersedianya *database* yang berfungsi sebagai bank data untuk mendukung kepentingan penyusunan berbagai indeks yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga terkait.

1.3. Tujuan

Penyusunan Laporan Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) bertujuan:

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan, baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota dan sebagai acuan dalam menilai tingkat daya saing Kabupaten/Kota yang ada di Aceh;

- 2) Mengidentifikasi strategi untuk memperbaiki situasi daerah oleh pengambil kebijakan dalam mendorong pola persaingan sehat dan kerjasama Kabupaten/Kota se-Aceh;
- 3) Menjadi kajian bagi Pemerintah Aceh dalam memberikan wawasan mengenai perbedaan tingkat pembangunan (termasuk ketimpangan) daya saing antar Kabupaten/Kota yang ada di Aceh;
- 4) Menjadi tolak ukur untuk melihat daya saing di tingkat Kabupaten/Kota dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan daya saing masing-masing daerah;
- 5) Memberikan gambaran umum potensi dan tantangan investasi di berbagai daerah di Aceh bagi pelaku usaha; dan
- 6) Berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh dan menyebarkan kreativitas intelektual kepada khalayak luas melalui akademisi dan peneliti.

1.4. Kerangka Pemikiran

Kajian ini berpedoman pada model yang dikembangkan oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI). Pendekatan ACI mengenai daya saing menggunakan kerangka yang komprehensif, terintegrasi dan sistemik, meliputi faktor-faktor berbeda yang secara kolektif menentukan kemampuan suatu wilayah atau provinsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang substansial dan inklusif dalam kurun waktu panjang.

Sesuai dengan pendekatan komprehensif tersebut, ACI mendefinisikan daya saing melalui 4 (empat) lingkup berbeda: (a) Stabilitas Ekonomi Makro, (b) Perencanaan Pemerintah dan Institusi, (c) Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja, dan (d) Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur. Untuk skema perhitungan Indeks Daya Saing Investasi masing-masing lingkup diberikan bobot yang sama (25%) dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Skema Perhitungan Indeks Daya Saing ACI

Kerangka pembedahan daya saing ACI menggunakan pendekatan bertingkat, dimana masing-masing dari empat lingkup tersebut dibagi menjadi tiga sub-lingkup (dengan kata lain, setiap sublingkup merupakan bagian dari lingkup yang jenjangnya lebih tinggi). Oleh karena itu, terdapat 12 sublingkup secara keseluruhan. Masing-masing sublingkup memiliki bobot kontribusi yang sama, yaitu 33,3% pada indeks lingkup masing-masing.

Dalam menggabungkan sublingkup menjadi lingkup, keempat lingkup tersebut menjadi peringkat keseluruhan Indeks Daya Saing. ACI menggunakan mekanisme penghitungan rata-rata dengan bobot setara. Walaupun pemberian bobot yang berbeda-beda untuk berbagai indikator mungkin terlihat sesuai, namun dapat juga menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, untuk mencapai gambaran seimbang dari faktor berbeda yang tergabung menjadi keseluruhan gagasan mengenai daya saing, tim penyusun menggunakan bobot yang sama pada semua indikator.

Dua lingkup dari empat lingkup daya saing ACI didominasi oleh sektor ekonomi dan keuangan, sedangkan sisanya mencakup politik, institusional, sosial, dan kondisi fisik. Secara keseluruhan, terdapat 12 sublingkup.

1. Stabilitas Ekonomi Makro, meliputi keseluruhan kondisi ekonomi di provinsi yang terdiri dari tiga sublingkup: *a) Kedinamisan Ekonomi Regional, b) Keterbukaan dalam Perdagangan dan Jasa, dan c) Daya Tarik terhadap Investasi Asing.*

2. Perencanaan Pemerintah dan Institusi, mencakup keberhasilan institusi pemerintahan dan juga harapan dari kemajuan di sektor publik yang terdiri dari sublingkup berikut: *a) Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal, b) Institusi, Pemerintahan dan Kepemimpinan, dan c) Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum.*
3. Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja, mewakili kinerja dan potensi perusahaan dan juga kondisi yang dihadapi manajer dalam menjalankan perusahaan yang terdiri dari sublingkup berikut: *a) Kemampuan Finansial dan Efisiensi Bisnis, b) Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, dan c) Kinerja Produktivitas.*
4. Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, mengombinasikan infrastruktur dengan penyediaan fasilitas sosial dasar yang terdiri dari sublingkup berikut: *a) Infrastruktur Fisik, b) Infrastruktur Teknologi, dan c) Standar Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial.*

1.5. Metodologi

a. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari data sekunder Tahun 2021, termasuk di dalamnya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai ekspor, nilai impor, panjang jalan beraspal, dan lain-lain. Data tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Setda Aceh, dan lain-lain.

b. Peralatan Analisis Data

1) Penghitungan Peringkat Daya Saing

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana mengolah berbagai jenis data yang ada menjadi sebuah analisis yang ilmiah. Ada 76 indikator yang digunakan dalam penelitian ini, dimana masing-masing menggunakan nilai atau ukuran yang berbeda, seperti PDRB dalam juta rupiah, panjang jalan beraspal dalam kilometer dan lain sebagainya.

Untuk tujuan menyatukan berbagai unit pengukuran ini, selanjutnya digunakan metode statistik nilai terstandarisasi. Nilai terstandarisasi adalah perbandingan relatif kinerja suatu Kabupaten/Kota dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota. Dengan demikian, unit pengukuran sebagaimana disebutkan di atas tidak lagi relevan.

Nilai terstandarisasi tidak memiliki unit pengukuran karena hanya mengukur kinerja relatif di antara Kabupaten/Kota, apapun indikatornya. Dengan kata lain, merujuk pada terminologi statistika, nilai terstandarisasi mengukur seberapa besar standar deviasi masing-masing Kabupaten/Kota dari rata-rata Kabupaten/Kota.



Dalam hal satu Kabupaten/Kota memiliki nilai terstandarisasi nol, maka Kabupaten/Kota tersebut memiliki kinerja rata-rata. Nilai negatif berarti kinerja provinsi atau wilayah tersebut berada di bawah rata-rata. Sebaliknya, nilai yang positif berarti kinerja yang berada di atas rata-rata. Semakin jauh skornya dari nol, berarti kinerja dari Kabupaten/Kota tersebut semakin jauh dari rata-rata seluruh Kabupaten/Kota.

Nilai terstandarisasi dari setiap indikator lalu diagregasikan secara sistematis, pertama pada tingkat sublingkup, dilanjutkan oleh agregasi pada tingkat lingkup dan akhirnya pada tingkatan keseluruhan. Hal ini memungkinkan untuk membandingkan kinerja dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh pada tingkat berbeda, dari Daya Saing Keseluruhan sampai indikator yang spesifik.

Secara rinci tahapan dan formulasi perhitungan peringkat daya saing Kabupaten/Kota di Aceh adalah sebagai berikut (Tan Khee Giap *et al.* 2018).

1. Hitung rata-rata indikator dengan formulasi berikut:

$$\bar{X}_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_{ij}$$

Di mana X_{ij} merepresentasikan nilai dari wilayah i ($i = 1, \dots, M$) mengacu pada indikator j .

2. Untuk setiap indikator j ($j = 1, \dots, M$), hitung standar deviasi (SD),

$$SD_j = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}$$

3. Hitung nilai terstandarisasi dari indikator (SVI) tiap wilayah i ($i = 1, \dots, M$) yang berada pada tiap indikator j ($j = 1, \dots, M$)
4. Hitung 'peringkat' nilai terstandarisasi indikator terkait (RSVI) yang mana tiap wilayah i ($i = 1, \dots, N$) berada pada masing-masing indikator j ($j = 1, \dots, M$):

$$RSVI_{ij} = \begin{cases} SVI_{ij}, & \text{jika semakin tinggi nilainya semakin baik} \\ -SVI_{ij}, & \text{jika semakin rendah nilainya semakin baik} \end{cases}$$

5. Untuk setiap indikator j ($j = 1, \dots, M$), peringkat dapat diperoleh untuk tiap wilayah: wilayah dengan nilai RSVI yang lebih tinggi untuk indikator j menempati posisi di atas wilayah yang memiliki nilai RSVI lebih rendah.
6. Untuk masing-masing wilayah i ($i = 1, \dots, N$), hitung RSVI dari tiap sublingkup k ($k = 1, \dots, S$) yang termasuk dalam lingkup l ($l = 1, \dots, C$),



$$Raw_RSVI_{i,lk} = \frac{1}{y_{lk}} \sum_{p=1}^{y_{lk}} RSVI_{i,jlk,p}$$

$$Mean_RSVI_{lk} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Raw_RSVI_{i,lk}$$

$$SD_RSVI_{lk} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Raw_RSVI_{i,lk} - Mean_RSVI_{lk})^2}$$

$$RSVI_{i,lk} = \frac{Raw_RSVI_{i,lk} - Mean_RSVI_{lk}}{SD_RSVI_{lk}}$$

Dimana y_{lk} adalah jumlah total indikator di bawah sublingkup k dari lingkup l dan $(RSVI_{i,jlk,1}, \dots, RSVI_{i,jlk,y_{lk}})$ adalah RSVI untuk wilayah i yang terdiri dari sublingkup k untuk lingkup l .

- Untuk masing-masing wilayah i ($i = 1, \dots, M$), hitung RSVI untuk masing-masing lingkup l ($l = 1, \dots, C$),

$$Raw_RSVI_{i,l} = \frac{1}{S_i} \sum_{k=1}^{S_i} RSVI_{i,lk}$$

$$Mean_RSVI_l = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Raw_RSVI_{i,l}$$

$$SD_RSVI_l = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Raw_RSVI_{i,l} - Mean_RSVI_l)^2}$$

$$RSVI_{i,l} = \frac{Raw_RSVI_{i,l} - Mean_RSVI_l}{SD_RSVI_l}$$

Di mana $(RSVI_{i,1}, \dots, RSVI_{i,S})$ adalah RSVI untuk sublingkup S dibawah lingkup l



8. Nilai peringkat keseluruhan wilayah $i (i = 1, \dots, M)$,

$$Raw_R_i = \frac{1}{C} \sum_{l=1}^c RSVI_{i,l}$$

$$Mean_R = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Raw_R_i$$

$$SD_R = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Raw_R_i - Mean_R)^2}$$

$$R_i = \frac{Raw_R_i - Mean_R}{SD_R}$$

Wilayah dengan R_i lebih tinggi menempati posisi di atas wilayah lain dengan nilai R_i yang lebih rendah, dan wilayah dengan R_i tertinggi adalah wilayah yang paling kompetitif.

Langkah (5) memberikan peringkat bagi setiap wilayah untuk masing-masing indikator. Untuk mendapatkan peringkat ini, langkah (4) menyesuaikan nilai SVI sehingga nilai yang lebih tinggi akan mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam hal daya saing. Hal ini tergantung pada konteks setiap indikator, dimana nilai yang lebih tinggi atau rendah bisa saja mencerminkan wilayah yang lebih kompetitif. Sebagai contoh, PDRB yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah akan mendorong daya saing suatu wilayah.

Pada situasi dimana nilai yang lebih tinggi menandakan daya saing yang lebih tinggi (contohnya PDRB), nilai SVI wilayah akan digunakan dan wilayah dengan SVI yang lebih tinggi akan mendapatkan peringkat yang lebih baik. Sementara itu, dalam situasi sebaliknya (contohnya tingkat pengangguran), nilai negatif SVI itu akan dibandingkan dan wilayah dengan nilai SVI yang lebih rendah akan memiliki peringkat yang lebih baik. Langkah (4) ini akan memastikan semua nilai terstandarisasi konsisten dengan tujuan pemeringkatannya.

Langkah (6) menentukan peringkat sublingkup untuk setiap wilayah. Nilai rata-rata RSVI dari seluruh indikator di sublingkup tertentu lalu dihitung dan distandarisasikan kembali untuk semua wilayah dan kemudian dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah dengan nilai rata rata RSVI yang lebih tinggi akan memiliki peringkat yang lebih baik di sublingkup ini.

Walaupun terdapat jumlah indikator yang berbeda-beda dalam setiap sublingkup, untuk studi daya saing di Indonesia, terdapat tiga sublingkup untuk setiap lingkup dengan total empat lingkup. Nilai agregat untuk setiap sublingkup memiliki bobot ekuivalen dengan 33.33% dari setiap nilai lingkup masing-masing.

Untuk sampai ke dalam peringkat tiap lingkup, RSVI dari setiap sublingkup dirata-rata dan distandardisasikan kembali untuk setiap wilayah seperti yang dijelaskan di langkah (7). Langkah (8) memerlukan setiap nilai RSVI dari masing-masing lingkup dirata-rata dan distandardisasikan kembali untuk seluruh wilayah dalam menentukan peringkat keseluruhan.

Wilayah dengan RSVI lebih tinggi berada di atas wilayah dengan RSVI yang lebih rendah. Bobot yang sama diberikan untuk tiap lingkup karena keempat lingkup tersebut memberikan kontribusi yang sama terhadap penghitungan Indeks Daya Saing Keseluruhan untuk wilayah-wilayah dan provinsi-provinsi di Indonesia. Metode ini dipakai berulang kali dan diaplikasikan secara konsisten untuk seluruh wilayah agar penghitungan peringkat akurat. Secara matematika, metode ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Indeks Daya Saing Keseluruhan Kabupaten/Kota di Aceh = $25\% \times (\text{Stabilitas Ekonomi Makro}) + 25\% \times (\text{Perencanaan Pemerintah dan Institusi}) + 25\% \times (\text{Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja}) + 25\% \times (\text{Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur})$.

c. Simulasi Peningkatan Daya Saing

Untuk melihat implikasi dari kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap peningkatan daya saing dapat diamati dengan Simulasi Peningkatan Daya Saing. Data yang ada yang dikumpulkan akan memungkinkan untuk dilakukan analisis mendalam tentang kinerja masing-masing Kabupaten/Kota menurut indikator, sublingkup, dan lingkup yang berbeda.

Dengan menganalisis data yang ada, dapat diidentifikasi bukan hanya peringkat Daya Saing Keseluruhan, tetapi juga indikator spesifik dimana sebuah Kabupaten/Kota berkinerja baik atau mengalami kesulitan. Kesimpulan dari simulasi ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Daya Saing daerah.

Simulasi daya saing ini dibuat berdasarkan perbaikan dari 20 indikator terlemah di setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan ulang nilai yang terstandardisasi berdasarkan perbaikan tersebut. Untuk menjalankan simulasi tersebut, pertama, diurutkan indikator-indikator untuk tiap Kabupaten/Kota dari nilai tertinggi sampai terendah.



Dengan begitu, dapat diidentifikasi 20 indikator terlemah setiap Kabupaten/Kota. Selanjutnya, nilai dari 20 indikator terlemah tersebut ditingkatkan pada level rata-rata. Ini berarti nilai dari indikator yang sebelumnya negatif dinaikkan ke nol. Jika sebelumnya sudah nol atau positif, maka skornya tidak diubah.

Sesudah skornya dinaikkan, maka dapat dihitung ulang peringkatnya, dengan asumsi bahwa Kabupaten/Kota lainnya tidak berubah. Karena itu, simulasi kebijakan ini dilakukan satu per satu untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota akan memiliki nilai terstandarisasi yang baru dan meningkat. Dengan demikian dapat diketahui ada tidaknya peningkatan daya saing suatu Kabupaten/Kota jika faktor-faktor terlemahnya diperbaiki sementara Kabupaten/Kota yang lain tidak melakukan tindakan apapun.

BAB II

ANALISA PERINGKAT DAYA SAING INVESTASI

2.1. Daya Saing Investasi Keseluruhan Kabupaten dan Kota se Aceh

Secara keseluruhan nilai indeks daya saing investasi 23 Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2022 mengalami peningkatan, dibandingkan Tahun 2021. Tabel 2.1 memperlihatkan peringkat daya saing keseluruhan Kabupaten/Kota di Aceh yang diukur melalui empat lingkup. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rentang total nilai dari yang terendah sebesar -1,179 sampai yang tertinggi sebesar 1,678.

Berdasarkan perhitungan total nilai tersebut, dapat diketahui peringkat daya saing terendah pada Tahun 2022 ditempati oleh Kota Subulussalam, sementara peringkat daya saing tertinggi ditempati Kota Banda Aceh. Pada Tahun 2022, terdapat 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang mendapat nilai positif dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya 11 (sebelas) Kabupaten/Kota. Hal ini menggambarkan kondisi daya saing investasi kabupaten/kota lebih baik dari tahun sebelumnya (2021).

Tabel 2.1 Daya Saing Investasi Keseluruhan Kabupaten Kota di Aceh Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Nilai Lingkup				Nilai Indeks Daya Saing	Peringkat
	Stabilitas Ekonomi Makro	Pemerintahan dan Institusi Publik	Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Banda Aceh	1.843	-0.182	3.132	1.920	1.678	1
Aceh Besar	1.504	1.745	0.898	1.288	1.359	2
Aceh Utara	1.031	0.445	1.171	0.624	0.818	3
Bireuen	0.772	0.750	0.922	0.567	0.753	4
Aceh Barat	-0.005	1.060	0.594	0.187	0.459	5
Lhokseumawe	1.428	-0.568	0.576	0.308	0.436	6
Aceh Tengah	-0.020	0.399	0.447	0.664	0.373	7
Nagan Raya	1.596	-0.674	0.541	-0.141	0.330	8
Pidie	0.415	0.455	0.137	0.086	0.273	9
Bener Meriah	-0.592	0.268	-0.035	1.082	0.181	10
Aceh Selatan	-0.550	0.899	-0.113	-0.112	0.031	11
Sabang	-0.918	-0.207	-0.661	1.849	0.016	12
Aceh Jaya	-0.560	0.587	-0.538	0.538	0.007	13
Langsa	-0.407	0.089	0.032	-0.132	-0.105	14
Aceh Timur	0.221	-0.355	0.195	-1.352	-0.323	15
Pidie Jaya	-0.994	0.828	-1.117	-0.156	-0.360	16
Aceh Tamiang	-0.420	-0.769	0.187	-0.887	-0.472	17
Singkil	-0.878	0.384	-1.321	-0.801	-0.654	18
Simeulue	-1.103	-0.781	-1.154	0.070	-0.742	19
Gayo Lues	-0.914	-0.495	-1.046	-1.289	-0.936	20
Aceh Barat Daya	-0.408	-1.359	-0.796	-1.284	-0.961	21
Aceh Tenggara	-0.600	-1.400	-1.026	-1.159	-1.046	22
Subulussalam	-0.552	-1.270	-1.025	-1.869	-1.179	23

Jika dibandingkan Tahun 2021, indeks daya saing investasi Tahun 2022 menunjukkan kenaikan nilai yang cukup signifikan. Kenaikan nilai indeks daya saing investasi didukung dengan kenaikan keempat lingkup di setiap kabupaten/kota, walaupun ada beberapa kab/kota mengalami penurunan skor.

Pada peringkat 3 (tiga) teratas tetap diduduki oleh Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Utara. Sementara untuk peringkat 10 (sepuluh) besar masih didominasi oleh kabupaten/kota yang sama. Peringkat 10 (sepuluh) besar dapat dilihat lebih jelas pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota se Aceh Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Nilai Lingkup								Nilai Indeks Daya Saing		Peringkat	
	Stabilitas Ekonomi Makro		Pemerintahan dan Institusi Publik		Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja		Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur					
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Banda Aceh	1.138	1.843	-0.083	-0.182	3.042	3.132	2.322	1.920	1.605	1.678	1	1
Aceh Besar	2.472	1.504	1.070	1.745	1.142	0.898	1.582	1.288	1.566	1.359	2	2
Aceh Utara	1.438	1.031	0.948	0.445	1.265	1.171	0.544	0.624	1.049	0.818	3	3
Bireuen	0.657	0.772	0.307	0.750	0.771	0.922	0.457	0.567	0.548	0.753	5	4
Aceh Barat	0.091	-0.005	0.884	1.060	0.745	0.594	0.210	0.187	0.483	0.459	7	5
Lhokseumawe	0.273	1.428	0.456	-0.568	0.978	0.576	0.666	0.308	0.593	0.436	4	6
Aceh Tengah	-0.119	-0.020	0.307	0.399	0.122	0.447	1.437	0.664	0.437	0.373	8	7
Nagan Raya	1.736	1.596	-0.502	-0.674	0.473	0.541	0.270	-0.141	0.494	0.330	6	8
Pidie	0.419	0.415	0.364	0.455	0.428	0.137	-0.465	0.086	0.186	0.273	9	9
Bener Meriah	-0.342	-0.592	0.424	0.268	-0.217	-0.035	0.518	1.082	0.096	0.181	10	10
Aceh Selatan	-0.599	-0.550	0.425	0.899	-0.349	-0.113	-0.961	-0.112	-0.371	0.031	15	11
Sabang	-0.649	-0.918	0.341	-0.207	-0.492	-0.661	1.053	1.849	0.063	0.016	11	12
Aceh Jaya	-0.681	-0.560	0.391	0.587	-0.644	-0.538	-0.243	0.538	-0.294	0.007	13	13
Langsa	-0.385	-0.407	-0.252	0.089	-0.197	0.032	-0.547	-0.132	-0.345	-0.105	14	14
Aceh Timur	0.445	0.221	-0.471	-0.355	0.132	0.195	-0.151	-1.352	-0.011	-0.323	12	15
Pidie Jaya	-0.769	-0.994	0.366	0.828	-1.369	-1.117	0.235	-0.156	-0.384	-0.360	16	16
Aceh Tamiang	-0.379	-0.420	-0.138	-0.769	-0.594	0.187	-0.833	-0.887	-0.486	-0.472	18	17
Singkil	-1.098	-0.878	0.387	0.384	-1.181	-1.321	-0.765	-0.801	-0.664	-0.654	20	18
Simeulue	-0.920	-1.103	-0.713	-0.781	-1.257	-1.154	0.062	0.070	-0.707	-0.742	21	19
Gayo Lues	-0.748	-0.914	0.166	-0.495	-0.656	-1.046	-1.142	-1.289	-0.595	-0.936	19	20
Aceh Barat Daya	-0.555	-0.408	0.459	-1.359	-0.610	-0.796	-0.960	-1.284	-0.416	-0.961	17	21
Aceh Tenggara	-0.576	-0.600	-0.866	-1.400	-0.410	-1.026	-1.423	-1.159	-0.819	-1.046	22	22
Subulussalam	-0.920	-0.552	-4.248	-1.270	-1.121	-1.025	-1.868	-1.869	-2.039	-1.179	23	23

2.2. Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simeulue

a. Gambaran Umum



Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.838.10 km². Menurut data BPS Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada Tahun 2021 berjumlah 93.762 orang, dengan PDRB per kapita sebesar Rp25.818.384,85,-. Pada Tahun 2021 juga tingkat

pertumbuhan PDRB Kabupaten Simeulue meningkat sebesar 6,59% dengan nilai PDRB sebesar 2.420,78 miliar rupiah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Simeulue didominasi oleh sektor tersier sebesar 40,7% dan diikuti sektor primer sebesar 35,7%.

Jumlah realisasi penanaman modal Kabupaten Simeulue pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.005.200.819,- atau menurun sebesar 67,65% dari tahun sebelumnya sebesar Rp15.471.071.250,-. Total realisasi penanaman modal tersebut setara dengan 0,2% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi penanaman modal terbesar di Kabupaten Simeulue adalah di sektor konstruksi dengan nilai investasi Rp2.050.559.077,-.

Berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Simeulue, ada 6 sektor yang menjadi fokus pengembangan penanaman modal di Kabupaten Simeulue, yaitu; sektor pariwisata, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan perdagangan.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan peringkat daya saing investasi Kabupaten Simeulue terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Peringkat Daya Saing Kabupaten Simeulue

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		19		10	
Nilai Terstandar		-0,742		0,190	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	23	14	Peringkat	20	6
Nilai Terstandar	-1,103	-0,546	Nilai Terstandar	-0,781	0,585
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	22	15	Peringkat	12	4
Nilai Terstandar	-1,154	-0,404	Nilai Terstandar	0,070	1,126

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Simeulue pada Tahun 2022 berada di urutan ke 19 dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dengan nilai terstandar sebesar -0,742. Secara peringkat Kabupaten Simeulue meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana Kabupaten Simeulue berada pada peringkat 21. Namun hal ini bukan hal yang menggembira karena secara nilai terstandar lebih rendah dibanding tahun lalu.

Jika 20 indikator terendah dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,190 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat ke 11. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Simeulue akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Kabupaten Simeulue berada pada posisi terendah dengan peringkat daya saing Kabupaten Simeulue berada pada urutan ke 23 dengan nilai terstandar sebesar -1,103. Inflasi pada Tahun 2021 ini meningkat 0,44% dibandingkan Tahun 2020, yaitu 3,13%. Selain itu, jika dilihat dalam keterbukaan perdagangan barang dan jasa, kondisi Kabupaten Simeulue menurun menjadi 1,47%. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian

terkait dengan lingkup ini antara lain jumlah PDRB per kapita, tingkat inflasi, jumlah ekspor, dan jumlah impor.

Jika menggunakan simulasi what if indikator tersebut diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Simeulue dapat meningkat dari peringkat 14 dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Simeulue berada pada urutan ke 20 dengan nilai terstandar sebesar -0,781. Sama seperti tahun sebelumnya indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu Evaluasi Kinerja Pemda. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Simeulue dapat meningkat sampai peringkat 6.

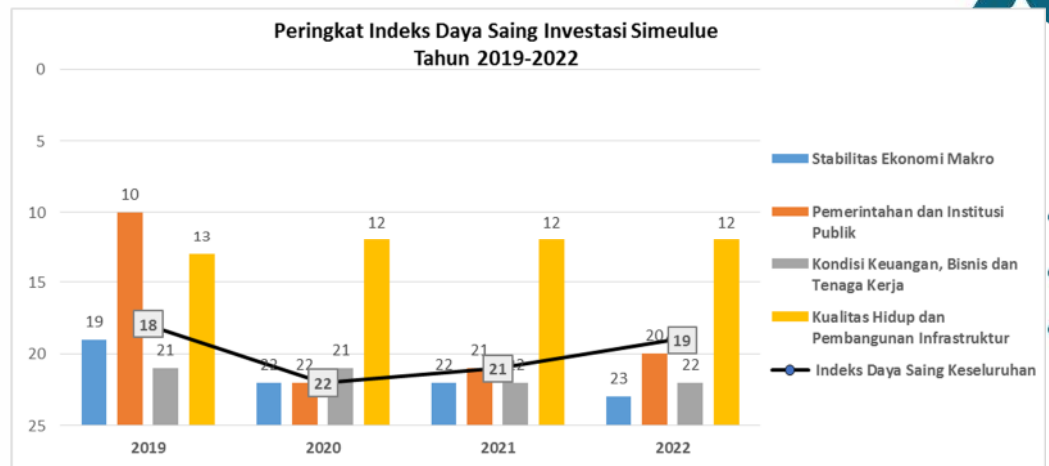
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Simeulue berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -1,154. Salah satu indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain kredit bermasalah, tingkat partisipasi angkatan kerja dan produktivitas industri primer. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Simeulue dapat meningkat menjadi peringkat 15.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kabupaten Simeulue berada pada urutan ke 12 dengan nilai terstandar sebesar 0,070. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain IPM, jumlah rumah tangga dengan jaringan pipa air, angka harapan hidup saat lahir. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simeulue dapat meningkat menjadi peringkat 4.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Simelue dilakukan perbaikan dan dengan asumsi jika kabupaten/kota lainnya tidak berubah, maka peringkat daya saing Kabupaten Simeulue yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 19 akan meningkat menjadi peringkat 10.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

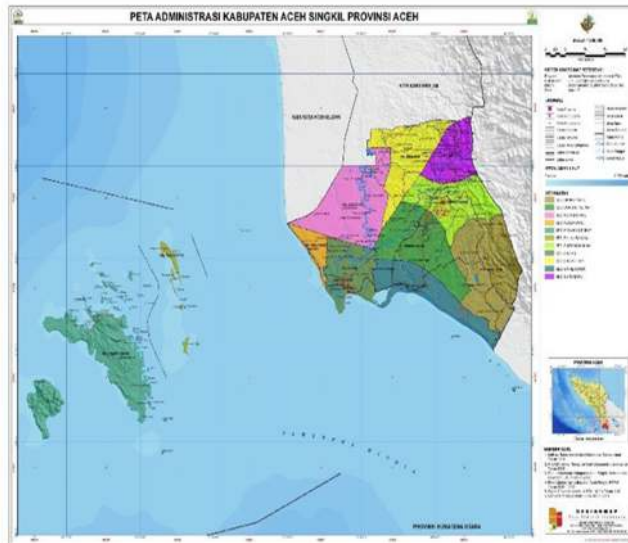
Tabel 2.4 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Simeulue

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Evaluasi Kinerja Pemda	-2.051	1	Tingkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Angka Harapan Hidup saat lahir	-1.377	2	Tingkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu hamil dan menyusui.
Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-1.230	3	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-1.130	4	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Indeks Pembangunan Manusia	-1.119	5	Sinergitas antara Pemprov dan Kab/Kota untuk peningkatan angka IPM; manfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan penyetaraan.
Ekspor, nonmigas	-1.064	6	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan.
Ekspor	-1.064	7	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan industri berbasis sumber daya lokal dan berbasis ekspor.

PDRB, nonmineral	-1.062	8	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif, promosi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0.992	9	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif, promosi.
Jumlah Penduduk	-0.990	10	-
Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0.985	11	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Produktivitas industri Primer	-0.981	12	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Impor	-0.971	13	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area.
Impor, nonmigas	-0.971	14	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Jumlah Penduduk Bekerja	-0.964	15	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Jumlah Angkatan Kerja	-0.956	16	Meningkatkan kualitas dan kompetensi Angkatan kerja.
Penduduk Perkotaan	-0.891	17	-
Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0.885	18	Tingkatkan alokasi dana untuk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); lakukan penguatan.
Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0.858	19	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Produktivitas Keseluruhan	-0.848	20	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

2. Kabupaten Aceh Singkil

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.857,88 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan proyeksi penduduk pada Tahun 2021 sebanyak 128.384 jiwa yang terdiri dari 64.936 jiwa penduduk laki-laki dan 63.448 jiwa penduduk perempuan.

Berdasarkan 17 sektor pendukung PDRB, terdapat 14 sektor yang mengalami pertumbuhan positif dan 3 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif. Salah satu penyebab meningkatnya peranan transportasi dan pergudangan Tahun 2021 adalah karena pelonggaran mobilitas sosial dan mobilitas ekonomi. Sektor kedua yang mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,32%.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Aceh Singkil atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2017 s.d 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 17,796 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2021 mencapai 21,05 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan karena pengaruh faktor inflasi.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp367.816.230.636,- meningkat 438,86% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 14,3% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Singkil adalah di sektor industri pertanian, kehutanan dan perikanan dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan nilai investasi Rp30.361.849.110,- dan diikuti dengan sektor industri pengolahan dengan nilai investasi sebesar Rp26.968.914.786,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Singkil terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.5 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Singkil

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		18		11	
Nilai Terstandar		-0,654		0,076	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	19	11	Peringkat	10	4
Nilai Terstandar	-0,878	-0,228	Nilai Terstandar	0,384	0,842
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	23	18	Peringkat	17	7
Nilai Terstandar	-1,321	-0,862	Nilai Terstandar	-0,801	0,554

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Singkil berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar -0,654. Terdapat 3 (tiga) lingkup memperlihatkan bahwa Kabupaten Aceh Singkil berada di bawah kabupaten kota yang lain. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,076 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 11. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Singkil akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Singkil berada pada urutan ke 19 dengan nilai terstandar sebesar -0,878. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB, PDRB per kapita, ekspor, dan impor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Singkil dapat meningkat pada peringkat 11.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat daya saing Kabupaten Singkil berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,384. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu tingkat kriminalitas. Bila indikator ini diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Singkil meningkat menjadi peringkat 4.

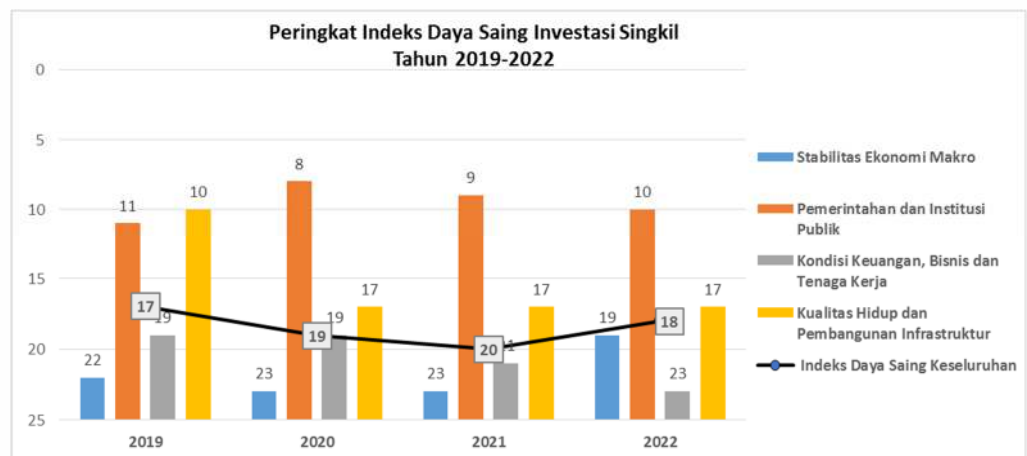
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Kabupaten Singkil berada pada posisi terendah, yaitu pada peringkat ke 23 dengan nilai terstandar sebesar -1,321. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain layanan perbankan dan tingkat pengangguran. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Singkil dapat meningkat sampai naik pada peringkat 18.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kabupaten Singkil berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar sebesar -0,801, sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain akses internet, APS (SD dan SMP), rasio murid per guru, dan rasio gini. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Singkil dapat meningkat sampai naik pada peringkat 7.

c. Perbaiki Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Singkil dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Singkil yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 18 akan meningkat menjadi peringkat 11 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Singkil

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Akses Internet dengan Telepon Genggam	-2.898	1	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-2.096	2	Dorong pembukaan kantor cabang Bank.
Rasio Gini	-1.578	3	Kembangkan kegiatan padat karya; beri insentif untuk kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja.
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-1.409	4	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Akses Internet di Rumah	-1.199	5	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-1.195	6	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan.
Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1.155	7	Memperluas program pendidikan keaksaraan, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi.
Akses Internet di Kantor	-1.139	8	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
PDRB per Kapita	-1.080	9	Dorong peningkatan dana transfer daerah; Efektifkan penggunaan dana otsus; tingkatkan perputaran uang.
Impor	-1.075	10	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area.
Impor, nonmigas	-1.075	11	
Produktivitas industri Primer	-1.074	12	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Tingkat Pengangguran	-1.067	13	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Ekspor, nonmigas	-1.057	14	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan.
Ekspor	-1.057	15	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan.

Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-1.033	16	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
PDRB, nonmineral	-1.030	17	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi.
Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-0.969	18	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
PDRB Industri Sekunder	-0.967	19	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0.966	20	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi.

3. Kabupaten Aceh Selatan

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 4.173,82 km². Berdasarkan sensus penduduk 2021, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 sebanyak 234.630 jiwa yang terdiri atas 116.954 jiwa penduduk perempuan dan 117.676 jiwa penduduk laki-laki.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 adalah 5.961,095 miliar rupiah. Sementara itu, PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 mencapai 2,46%, naik sebesar 2,96% dibanding Tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori jasa kesehatan sebesar 9,79% pada Tahun 2021. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Lapangan usaha penyumbang terbesar struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. yakni sebesar 26,28%.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di kabupaten Aceh Selatan adalah di sektor Industri Pengolahan dengan nilai investasi Rp159.036.682.835,- dengan bidang usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) nilai investasi sebesar Rp113.465.365.457,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Selatan terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Selatan

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		11		5	
Nilai Terstandar		-0,031		0,487	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	14	11	Peringkat	3	3
Nilai Terstandar	-0,550	-0,271	Nilai Terstandar	0,899	0,899
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	14	9	Peringkat	13	4
Nilai Terstandar	-0,113	0,232	Nilai Terstandar	-0,112	1,088

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Selatan berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar -0,031. Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 meningkat dibanding Tahun 2021, dimana pada Tahun 2021 berada pada peringkat 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,371, sejumlah indikator investasi memperlihatkan bahwa Kabupaten Aceh Selatan berada di bawah Kabupaten Kota yang lain. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi peringkat ke 5 yang disertai dengan meningkatnya nilai terstandar menjadi 0,487. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Selatan akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang

b. Kondisi Daya Saing Investasi**1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro**

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Selatan berada pada urutan ke 14 dengan nilai terstandar sebesar -0,550. Dilihat pada setiap indikator pada lingkup Stabilitas Ekonomi Makro sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian, antara lain PDRB per Kapita, Ekspor dan Impor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkat menjadi peringkat 11.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat daya saing Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 berada pada urutan ke 4 dengan nilai terstandar sebesar 0,899, meningkatkan dibandingkan Tahun 2021 diperingkat ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,425. Dari 9 (sembilan) indikator pada lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami peningkatan, yaitu pendapatan pajak dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sebagian besar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, selain itu, indikator dalam lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik tidak termasuk dalam 20 indikator terendah untuk Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

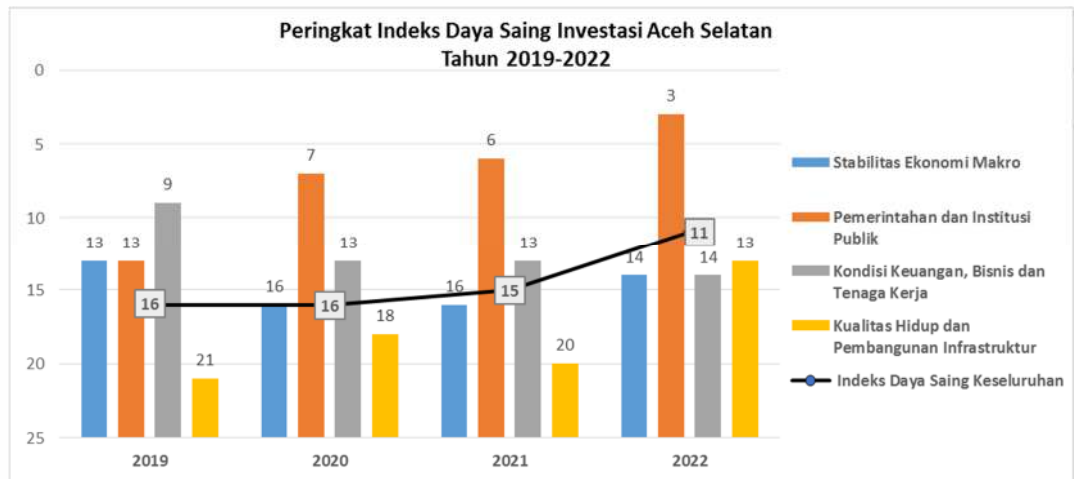
Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Selatan berada pada urutan ke 14 dengan nilai terstandar sebesar -0,113. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan kinerja produktivitas. Indikator-indikator ini perlu diperbaiki pada tahun lalu. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan dapat pada peringkat 9.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kabupaten Aceh Selatan berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar -0,112. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan penduduk, penggunaan telepon genggam dan komputer, Akses internet di kantor, tingkat buta huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (SD), IPM, AHH dan akses sanitasi layak.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkat sampai naik pada peringkat 4 dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

c. Perbaiki Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Selatan dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Selatan yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 11 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah/Kabupaten Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

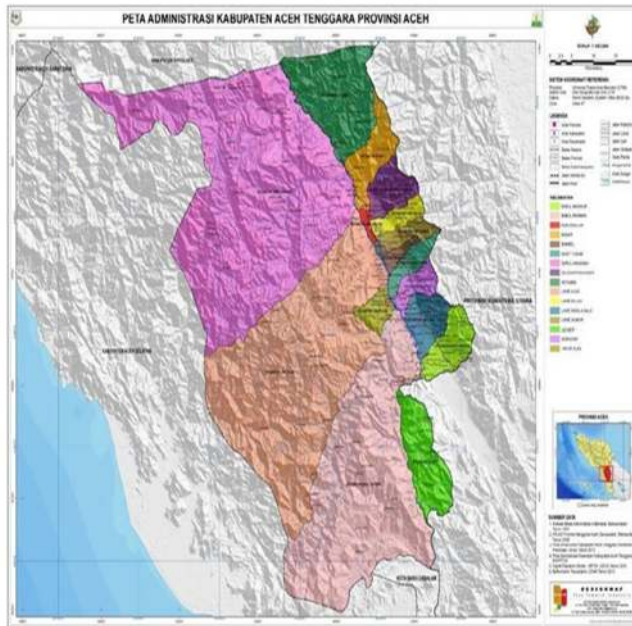
Tabel 2.8 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Selatan

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Angka Harapan Hidup saat lahir	-1.778	1	Tingkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu hamil dan menyusui.
Akses Internet di Kantor	-1.271	2	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-1.114	3	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.
Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-0.999	4	Memperluas program pendidikan keaksaraan, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi.
Produktivitas industri Primer	-0.957	5	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-0.938	6	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-0.926	7	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan.
Indeks Pembangunan Manusia	-0.891	8	Sinergitas antara Pemprov dan Kab/Kota untuk peningkatan angka IPM; manfaatkan Tehnologi Informasi dan Komukasi (TIK) untuk meningkatkan penyeteraan.
Pertumbuhan Penduduk	-0.766	9	Pengembangan program transmigrasi.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0.743	10	Memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, Perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
Produktivitas Keseluruhan	-0.690	11	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
PDRB per Kapita	-0.662	12	Dorong peningkatan dana transfer daerah; Efektifkan penggunaan dana otsus; tingkatkan perputaran uang di daerah melalui pengembangan program swadaya sandang/ pangan; dorong peningkatan ekspor produk lokal.
Ekspor, nonmigas	-0.601	13	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Ekspor	-0.601	14	
Produktivitas Keseluruhan, non migas	-0.563	15	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Rata-rata Lama Sekolah	-0.549	16	Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang Pendidikan.
PDRB per Kapita, nonmineral	-0.544	17	Dorong peningkatan dana transfer daerah; Efektifkan pengfgunaan dana otsus; tingkatkan perputaran uang di daerah melalui pengembangan program swadaya sandang/ pangan; d peningkatan ekspor produk lokal.
Persentase Penduduk Menggunakan Komputer	-0.502	18	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Impor	-0.491	19	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Impor, nonmigas	-0.491	20	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.

4. Kabupaten Aceh Tenggara

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 5.719,58 km². Jumlah penduduk Aceh Tenggara Tahun 2021 berdasarkan hasil SP2020 (September) dan hasil proyeksi interim 2020-2023 (pertengahan tahun/juni) adalah sebanyak 224.119 jiwa dengan rincian 112.455 jiwa penduduk laki-laki dan 111.664 jiwa penduduk perempuan.

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2021 sebesar 5.401,59 miliar rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 3.487,16 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB Aceh Tenggara pada Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,48%.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp201.401.219.507,-. Angka tersebut setara dengan 3,73% PDRB Tahun 2021. Inflasi pada Tahun 2021 meningkat sebesar 5,2% dibandingkan Tahun 2020 sebesar 3,3%.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi utama di Kabupaten Tenggara adalah sektor industri pengolahan dengan nilai investasi Rp160.000.000,-, khusus pada bidang usaha Industri pupuk hara makro sekunder. Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Tenggara terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Tenggara

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		22		12	
Nilai Terstandar		- 1,046		- 0,031	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	18	13	Peringkat	23	12
Nilai Terstandar	-0,592	-0,432	Nilai Terstandar	-1,400	0,119
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	19	13	Peringkat	19	9
Nilai Terstandar	-1,026	-0,058	Nilai Terstandar	-1,159	0,247

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Tenggara berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -1,046. Dari indikator investasi memperlihatkan bahwa Kabupaten Aceh Tenggara berada di bawah kabupaten/kota yang lain. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi -0,031, disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 12. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Tenggara akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tenggara berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar -0,592. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain Pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita dan PDRB Industri Sekunder. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkat menjadi peringkat 13.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tenggara berada pada peringkat terendah, yaitu pada urutan ke 23 dengan nilai terstandar sebesar -1,400. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu keseimbangan fiskal dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkat sampai peringkat 12.

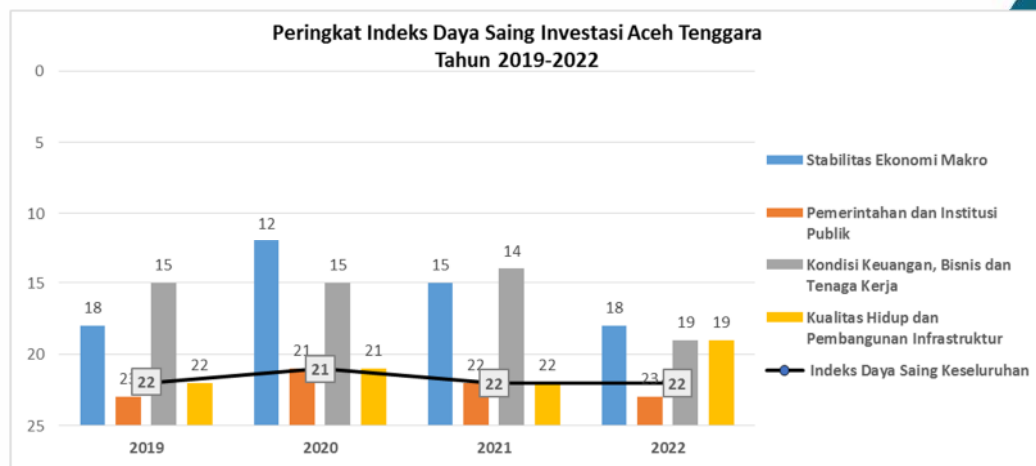
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tenggara berada pada urutan ke 19 dengan nilai terstandar sebesar -1,026. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini antara lain jumlah kredit bermasalah, layanan perbankan, jumlah produktivitas industri primer, dan jumlah pekerja sektor sekunder. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkat sampai naik pada peringkat 13.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tenggara berada pada urutan ke 19 dengan nilai terstandar sebesar -1,159. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini antara lain panjang jalan beraspal, ketersediaan pelabuhan, persentase kepemilikan rumah, persentase penggunaan telepon genggam dan komputer, akses internet, rasio murid dan guru (SD, SMP dan SMU), serta sanitasi layak. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkat sampai naik pada peringkat 9.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tenggara yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 22 akan meningkat menjadi peringkat 12 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Tenggara

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Keseimbangan Fiskal	-4.690	1	Operasi pasar reguler; perbaikan tata niaga; kontrol struktur pasar, Menjaga keseimbangan pengeluaran dan pendapatan daerah.
Jumlah Kredit Bermasalah	-4.420	2	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-1.577	3	Dorong pembukaan kantor cabang Bank.
Evaluasi Kinerja Pemda	-1.414	4	Tingkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-1.137	5	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Persentase kepemilikan rumah	-1.128	6	Tingkatkan program bantuan pembangunan rumah untuk orang tidak mampu.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-1.102	7	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.
PDRB Industri Sekunder	-0.965	8	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri sekunder.

Pertumbuhan PDRB	-0.915	9	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Produktivitas industri Primer	-0.870	10	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0.862	11	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Akses Internet di Kantor	-0.831	12	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-0.820	13	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Produktivitas Keseluruhan	-0.799	14	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-0.775	15	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
PDRB per Kapita	-0.764	16	Dorong peningkatan dana transfer daerah; Efektifkan penggunaan dana otsus; tingkatkan perputaran uang di daerah melalui pengembangan program swadaya sandang/pangan; dorong peningkatan ekspor produk lokal.
Persentase Penduduk Menggunakan Komputer	-0.748	17	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-0.725	18	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Persentase Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0.716	19	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Produktivitas industri Sekunder	-0.692	20	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

5. Kabupaten Aceh Timur
a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 6.040,60 km². Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur hasil Proyeksi Penduduk 2021 adalah 427.032 jiwa, terdiri dari 214.655 jiwa penduduk laki-laki dan 212.377 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 mencapai 70,69 jiwa per km².

Tahun 2021 nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur sebesar 11.652,64 miliar rupiah atau meningkat sebesar 1.046,86 miliar rupiah dibanding

Tahun 2020 yang mencapai Rp10.605,78 miliar dengan PDRB perkapita sebesar Rp27.287.512,41,-. Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp129.390.069.738,-.

Berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Aceh Timur, ada 3 sektor yang menjadi fokus pengembangan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur, yaitu Pengembangan argoindustri (Pengembangan argoindustri berbasis tanaman pangan, komoditas utamanya padi; Pengembangan argoindustri berbasis komoditas perkebunan kopi dan kelapa sawit; Pengembangan argoindustri berbasis komoditas perikanan dan pengolahan tangkapan ikan), Pengembangan pariwisata, serta Pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021, realisasi investasi terbesar di kabupaten Aceh Timur adalah di bidang usaha Konstruksi dengan nilai investasi Rp100.460.973.035,-. Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Timur terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Timur

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		15		5	
Nilai Terstandar		-0,323		0,436	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	8	7	Peringkat	15	10
Nilai Terstandar	0,221	0,411	Nilai Terstandar	-0,355	0,371
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	9	9	Peringkat	22	5
Nilai Terstandar	0,195	0,247	Nilai Terstandar	-1,352	0,715

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,323. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,436 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 5. Dari 4 (empat) lingkup, lingkup kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur merupakan lingkup terendah dengan peringkat 22 dari 23 kabupaten/kota. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Timur akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar sebesar 0,221 turun dari tahun sebelumnya pada peringkat ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,445, indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah pertumbuhan PDRB dan realisasi penanaman modal domestik. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Timur dapat meningkat dengan nilai terstandar 0,411 pada peringkat ke 7.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat daya saing Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,355, indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu evaluasi kinerja Pemda. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Timur dapat meningkat pada peringkat 10 dengan nilai terstandar 0,371.

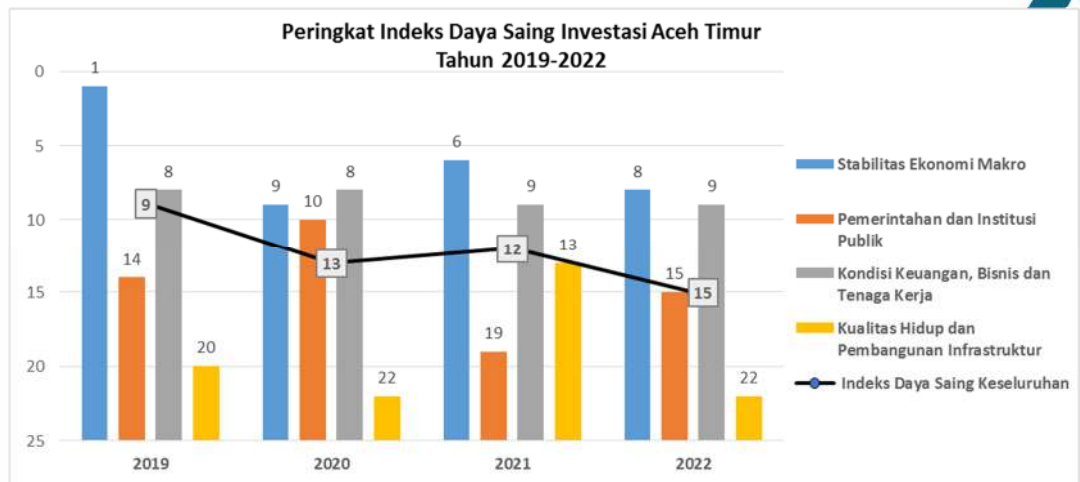
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat daya saing Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 9 dengan nilai terstandar sebesar 0,195. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah layanan perbankan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan produktivitas industri sekunder. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka nilai terstandar pada kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Timur meningkat menjadi 0,247 dengan peringkat tetap ke 9.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -1,352. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah pelabuhan, akses komunikasi (sambungan telepon, telepon genggam, komputer), akses internet (rumah, kantor, sekolah, dan telepon genggam), RLS, APS (SMP dan SMA), IPM, akses sanitasi layak dan kejadian bencana alam. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Timur dapat meningkat pada peringkat 5.

c. Perbaiki Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Timur dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Timur yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 15 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Untuk perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

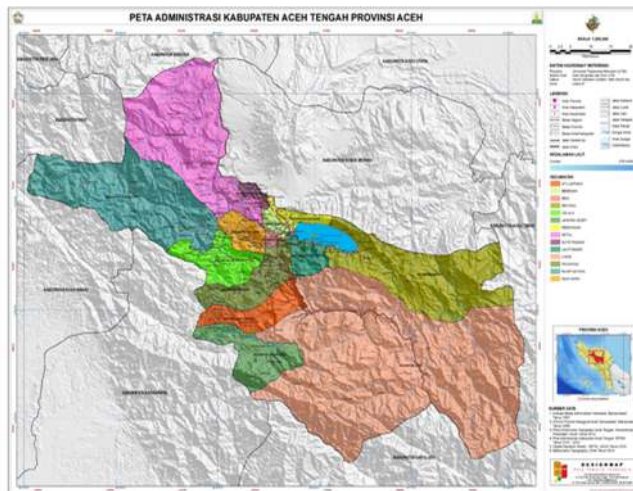
Tabel 2.12 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Timur

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-2.387	1	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Akses Internet di Rumah	-2.326	2	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Akses Internet di Sekolah	-2.120	3	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Evaluasi Kinerja Pemda	-1.327	4	Tingkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Akses Internet di Kantor	-1.242	5	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Rata-rata Lama Sekolah	-1.138	6	Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang Pendidikan.
Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-1.032	7	Dorong pembukaan kantor cabang Bank.
Persentase Penduduk Menggunakan Komputer	-0.978	8	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0.966	9	Memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, Perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
Jumlah kejadian bencana alam	-0.870	10	Aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalisir resiko bencana.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0.862	11	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-0.808	12	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Indeks Pembangunan Manusia	-0.805	13	Sinergitas antara Pemprov dan Kab/Kota untuk peningkatan angka IPM; manfaatkan Tehnologi Informasi dan Komukasi (TIK) untuk meningkatkan penyeteraan.
rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-0.800	14	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.
Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-0.799	15	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0.751	16	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Persentase Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0.716	17	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Produktivitas industriSekunder	-0.641	18	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Pertumbuhan PDRB	-0.621	19	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Rata-rata PMD dalam 3 tahun terakhir	-0.583	20	Meningkatkan promosi investasi.

6. Kabupaten Aceh Tengah

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 445.404,13 Ha. Menurut data BPS pada Tahun 2021 Kabupaten Aceh Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 218.684 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,44% dengan PDRB perkapita

sebesar Rp36.573.082,62,-. Pada Tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,27%.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp563.424.398.061,- atau menurun 36,96% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 7,04% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi Kabupaten Aceh Tengah terbesar pada sektor Pengadaan listrik dan gas dengan nilai investasi Rp516.619.715.873,- dengan bidang usaha ketenagalistrikan dengan nilai investasi Rp510.607.930.923,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Tengah terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Tengah

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
			Sebelum		Menjadi
Peringkat			7		5
Nilai Terstandar			0,373		0,702
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	10	9	Peringkat	9	7
Nilai Terstandar	-0,020	0,153	Nilai Terstandar	0,399	0,486
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	8	5	Peringkat	5	3
Nilai Terstandar	0,447	0,630	Nilai Terstandar	0,664	1,540

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,373. Dari 4 (empat) lingkup yang mendukung indeks daya saing investasi daerah, lingkup stabilitas ekonomi makro memperlihatkan nilai terstandar negatif. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,702 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 5. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Tengah akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar -0,020. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pembentukan modal tetap bruto, impor, ekspor, keterbukaan dalam perdagangan dan penanaman modal asing. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat menjadi peringkat 9 dengan nilai terstandar 0,153.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 9 dengan nilai terstandar sebesar 0,399. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah pendapatan pajak Pemda. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat menjadi peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,486.

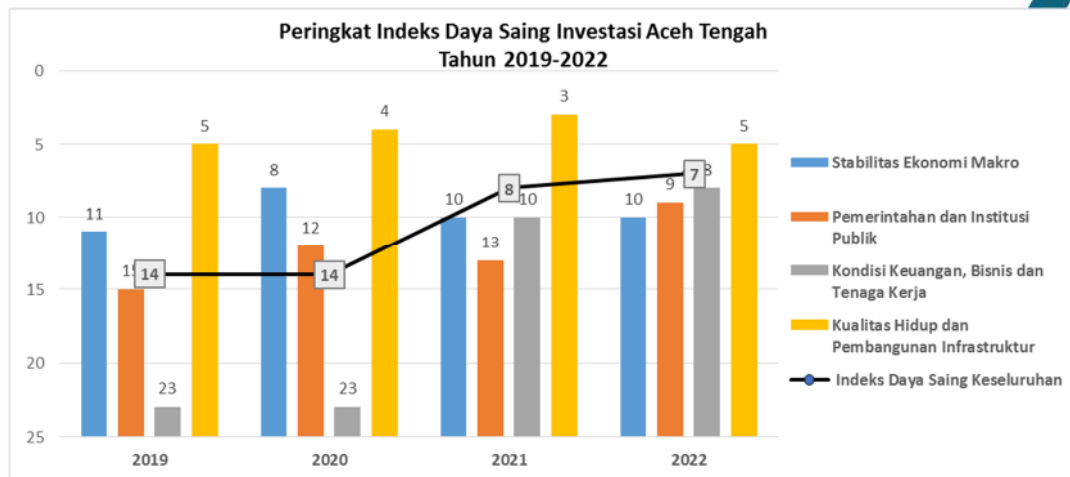
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar sebesar 0,477. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain total pinjaman bank, jumlah pekerja di sektor sekunder dan tersier, produktivitas keseluruhan, serta produktivitas industri primer. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat sampai naik pada peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,630.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,664. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah ketersediaan pelabuhan dan bandara, kepemilikan rumah, akses internet di kantor dan telepon genggam, APS (SMP dan SD), serta kejadian bencana alam. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat menjadi peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,540

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



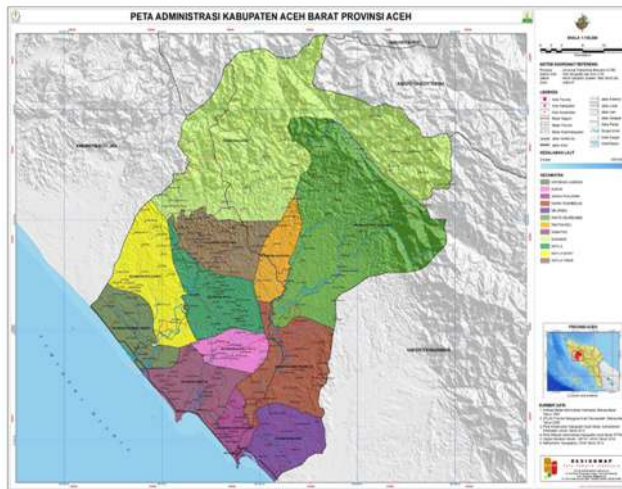
Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tengah yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 7 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Tengah

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah kejadian bencana alam	-2.204	1	Aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalisir resiko bencana.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-1.555	2	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0.862	3	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0.532	4	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Akses Internet di Kantor	-0.521	5	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Produktivitas industri Primer	-0.475	6	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0.452	7	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Persentase kepemilikan rumah	-0.423	8	Tingkatkan program bantuan pembangunan rumah untuk orang tidak mampu.

Impor	-0.342	9	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Impor, nonmigas	-0.342	10	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Pendapatan Pajak Pemda	-0.317	11	Tingkatkan PAD daerah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pemungutan PAD.
Keterbukaan dalam Perdagangan	-0.310	12	Tingkatkan aktivitas ekspor dibanding impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor.
Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0.258	13	Meningkatkan promosi investasi.
Jumlah ketersediaan bandara	-0.249	14	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Total Pinjaman Bank	-0.245	15	-
Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0.245	16	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Produktivitas Keseluruhan	-0.234	17	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	-0.213	18	Peningkatan penerimaan pajak bisa juga dilakukan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan, mengembangkan pengolahan data dan informasi perpajakan.
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0.212	19	Dorong pengembangan industri dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri, peningkatan investasi.
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-0.173	20	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.

7. Kabupaten Aceh Barat
a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 2.927,95 Km². Menurut hasil proyeksi interim BPS pada Tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 200.579 orang terdiri laki-laki sebanyak 101.443 orang dan perempuan 99.136 orang.

PDRB perkapita sebesar Rp49.799.001,89,-. Pada tahun yang sama tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat sebesar 5,67%. Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp93.927.377.260,-, angka tersebut setara dengan 0,94% PDRB Tahun 2021. Tingkat inflasi pada Tahun 2021 cukup tinggi dibandingkan Tahun 2020 yaitu 16,57%. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya indeks kelompok pengeluaran

Realisasi investasi Kabupaten Barat diperoleh dari PMDN. Berdasarkan data managerial PMDN Tahun 2021, realisasi investasi terbesar di kabupaten Aceh Barat adalah di sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai investasi Rp43.281.529.701,- dan diikuti dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai investasi sebesar Rp24.129.056.478,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Barat terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Barat

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		5		3	
Nilai Terstandar		0,459		0,852	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	9	8	Peringkat	2	2
Nilai Terstandar	-0,005	0,391	Nilai Terstandar	1,060	1,060
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	5	5	Peringkat	10	3
Nilai Terstandar	0,594	0,762	Nilai Terstandar	0,187	1,193

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,459. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,852 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 3. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Barat akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 9 dengan nilai terstandar sebesar -0,005. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain Inflasi, ekspor, impor dan realisasi investasi. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat drastis sampai naik pada peringkat 8 dengan nilai terstandar 0,391.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 berada pada peringkat 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,060. Seluruh indikator yang mendukung lingkup ini menunjukkan nilai positif sehingga pada lingkup ini tidak ada yang perlu diperbaiki indikatornya.

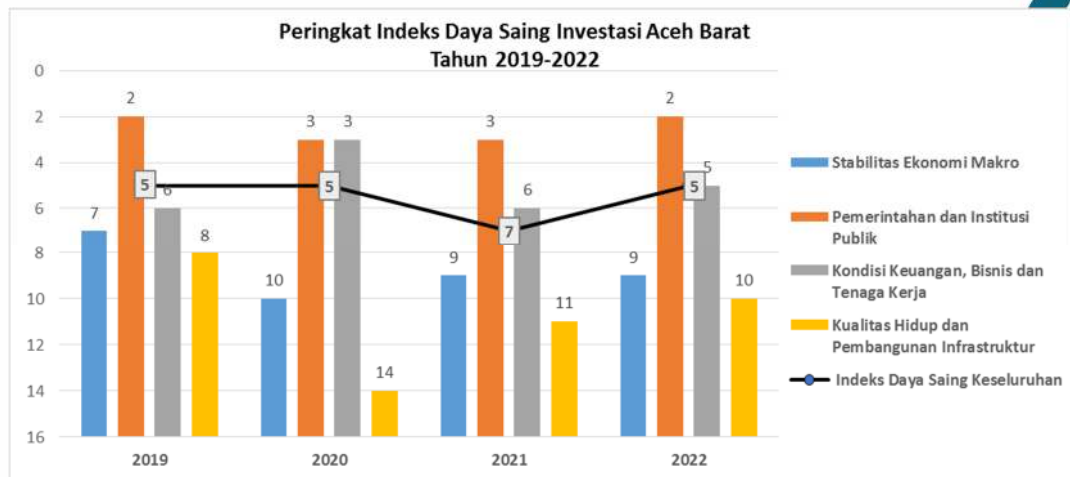
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,549. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja dan tingkat pengangguran. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka nilai terstandar Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat menjadi sebesar 0,762.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,187. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan penduduk, jumlah ketersediaan bandara, jumlah rumah tangga dengan jaringan pipa air, penggunaan sambungan telepon, akses internet di sekolah dan telepon genggam, angka partisipasi sekolah (SD dan SMP), rasio gini dan jumlah kejadian bencana alam. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat menjadi peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,193.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



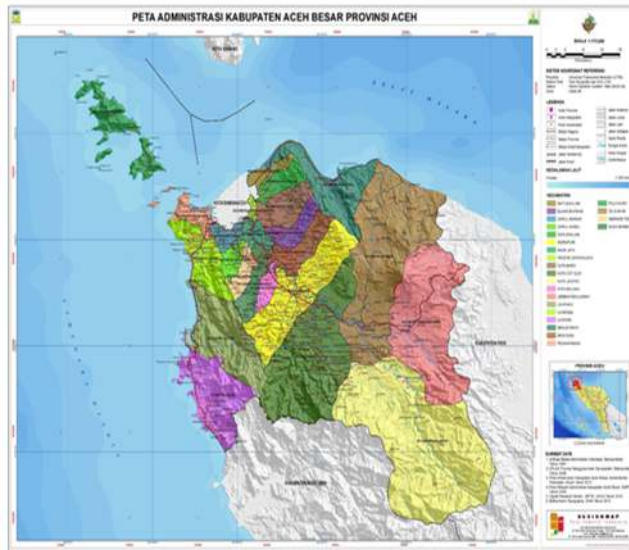
Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Barat dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 5 akan meningkat menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Untuk perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Inflasi [R]	-2.046	1	Lakukan operasi pasar reguler; tingkatkan kapasitas lokal untuk pemenuhan kebutuhan harian.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-1.224	2	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0.949	3	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0.873	4	Memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, Perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0.841	5	Tingkatkan alokasi dana untuk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); lakukan penguatan kelembagaan SPAM.
Akses Internet di Sekolah	-0.840	6	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Pertumbuhan Penduduk	-0.816	7	Pengembangan program transmigrasi.
Persentase Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0.716	8	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.

Tingkat Pengangguran	-0.536	9	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-0.430	10	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0.421	11	Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir.
Keterbukaan dalam Perdagangan	-0.369	12	Tingkatkan aktivitas ekspor dibanding impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor.
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-0.298	13	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0.294	14	Meningkatkan promosi investasi.
Jumlah kejadian bencana alam	-0.277	15	Aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalisir resiko bencana.
Impor	-0.272	16	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Impor, nonmigas	-0.272	17	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Rasio Gini	-0.260	18	Kembangkan kegiatan padat karya; beri insentif untuk kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja; bansos untuk masyarakat sangat miskin.
Jumlah ketersediaan bandara	-0.249	19	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Jumlah Penduduk Bekerja	-0.232	20	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.

8. Kabupaten Aceh Besar
a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 2.969,00 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil sensus penduduk Tahun 2021 adalah 405.535 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 204.428 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 201.107 jiwa.

Pada Tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Aceh Besar ada sebanyak 187.623. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 92,38% berstatus bekerja, sedangkan 7,62% merupakan pengangguran terbuka. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2021 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai sebesar 14,02 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,69 triliun rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB Tahun 2020 yang sebesar 13,33 triliun rupiah.

Kondisi perekonomian secara global dan nasional perlahan-lahan mengalami kebangkitan pasca terpuruk selama 2 tahun terakhir akibat pandemi Covid19. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi beberapa sektor, seperti sektor pertanian dan sektor informasi dan komunikasi. Sementara beberapa sektor lainnya justru mengalami penurunan nilai PDRB, seperti sektor konstruksi dan transportasi dan pergudangan.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.610.550.219.175,- atau menurun 60,07% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 11,49% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Besar adalah di sektor konstruksi dengan nilai investasi Rp1.083.496.585.758,-, dengan bidang usaha konstruksi jalan raya dengan realisasi investasi sebesar Rp617.201.066.907,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Besar terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Besar

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		2		1	
Nilai Terstandar		1,359		1,745	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	3	2	Peringkat	1	1
Nilai Terstandar	1,504	1,683	Nilai Terstandar	1,745	1,994
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	4	3	Peringkat	3	1
Nilai Terstandar	0,898	1,094	Nilai Terstandar	1,288	2,208

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Besar berada pada urutan ke 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,359. Walaupun dilihat dari nilai terstandar secara keseluruhan berada pada urutan atas, sejumlah indikator investasi memperlihatkan bahwa Kabupaten Aceh Besar berada di bawah Kabupaten Kota yang lain. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,745 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 1.

Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Besar akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dibandingkan daya saing investasi Tahun 2021, dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Besar menurun pada Tahun 2022. Dari peringkat ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 2,472 menjadi peringkat ke 3 dengan nilai terstandar 1,504 untuk Tahun 2022. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian

terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan PDRB, pembentukan modal tetap bruto dan rata-rata penanaman modal asing dalam 3 tahun terakhir. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Besar meningkat menjadi peringkat 2, dengan meningkatnya nilai terstandar menjadi sebesar 1,683.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Besar berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 1,745. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah tingkat penyelesaian kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Besar dapat meningkat pada peringkat 1 dengan nilai terstandar menjadi 1,994.

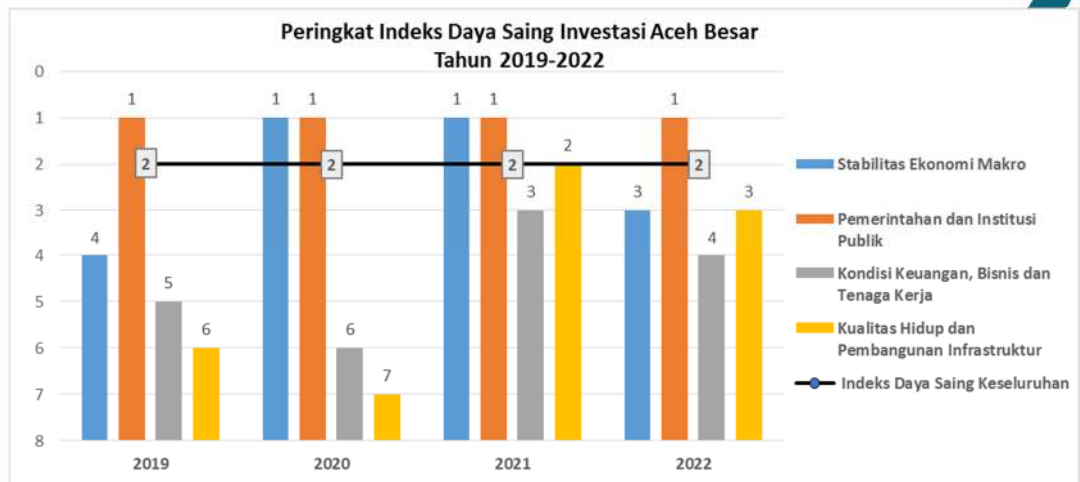
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Besar berada pada urutan ke 4 dengan nilai terstandar sebesar 0,898. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar meningkat pada peringkat 3 dengan nilai terstandar sebesar 1,094.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kabupaten Aceh Besar berada pada urutan ke 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,582. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan penduduk, ketersediaan bandara, jaringan pipa air, akses internet telepon genggam, APS (SD, SMP, SMA) rasio murid per guru (SD dan SMP), rasio gini, jumlah tenaga kesehatan, serta jumlah kejadian bencana alam. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Besar dapat meningkat pada peringkat 1 dengan nilai terstandar 2,208.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Besar dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Besar yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 2 akan meningkat menjadi peringkat 1 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

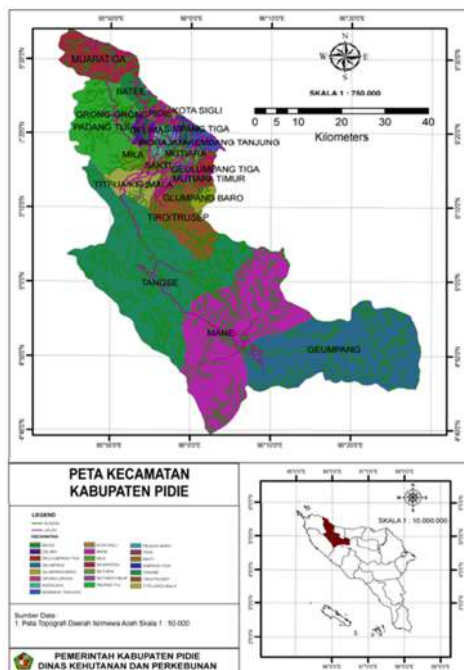
Tabel 2.18 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Besar

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-2.960	1	Perekrutan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
Pertumbuhan PDRB	-1.664	2	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-1.215	3	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0.960	4	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0.817	5	Tingkatkan alokasi dana untuk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); lakukan penguatan kelembagaan SPAM.
Tingkat Pengangguran	-0.791	6	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Jumlah kejadian bencana alam	-0.722	7	Aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalisir resiko bencana.
Pertumbuhan Penduduk	-0.692	8	Pengembangan program transmigrasi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0.609	9	Memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, Perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-0.563	10	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Produktivitas industri Tersier	-0.379	11	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-0.298	12	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Rasio Gini	-0.292	13	Kembangkan kegiatan padat karya; beri insentif untuk kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja; bansos untuk masyarakat sangat miskin.
Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0.283	14	Meningkatkan promosi investasi.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-0.274	15	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0.206	16	Dorong pengembangan industri dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri, peningkatan investasi.
Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-0.201	17	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-0.181	18	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Jumlah ketersediaan bandara	-0.169	19	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi
Produktivitas industri Sekunder	-0.159	20	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

9. Kabupaten Pidie

a. Gambaran Umum



Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 3.184,85 Km². Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020, Penduduk Kabupaten Pidie Tahun 2021 berjumlah 439.398 jiwa yang terdiri dari 217.964 jiwa (49,61 persen) laki-laki dan 221.434 jiwa (50,39 persen) perempuan. Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 98,4.

Pada Tahun 2021 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di Kabupaten Pidie adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 40,03%.

Selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,41% (meningkat dari 14,27% di Tahun 2020), disusul oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,98% (meningkat dari 10,54% di Tahun 2020).

Sementara pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pidie, dapat dilihat dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 7,77 triliun rupiah pada Tahun 2020 menjadi 7,98 triliun rupiah pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Pidie Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sekitar 2,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha setelah adanya kebijakan new normal yang diterapkan selama masa pandemi Corona yang melanda secara global.

Pada Tahun 2021 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di Kabupaten Pidie adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 40,03%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,41%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,98%, dan konstruksi 7,23%. Rata-rata distribusi presentase ekonomi kabupaten Pidie secara riil selama periode 2017 s.d. 2021 masih didominasi oleh keempat sektor tersebut.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Pidie pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp420.326.709.412,-. Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di kabupaten Pidie merupakan kontribusi dari sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar Rp392.229.744.132,-

dengan bidang usahanya Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api nilai investasi Rp213.172.007.628,-
 Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Pidie terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Peringkat Daya Saing Kabupaten Pidie

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		9		3	
Nilai Terstandar		0,273		0,802	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	7	7	Peringkat	7	6
Nilai Terstandar	0,415	0,489	Nilai Terstandar	0,455	0,667
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	11	5	Peringkat	11	3
Nilai Terstandar	0,137	0,665	Nilai Terstandar	-0,086	1,389

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 9 dengan nilai terstandar sebesar 0,273. Dari seluruh indikator yang mendukung daya saing investasi, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan nilai negatif. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,802 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 3. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Pidie akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,415. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah PDRB per kapita. Jika indikator tersebut dapat

diperbaiki, maka nilai terstandar Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Pidie dapat meningkat menjadi sebesar 0,489.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,455. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah tingkat kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Pidie dapat meningkat sampai naik pada peringkat 6 dengan nilai terstandar 0,667.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

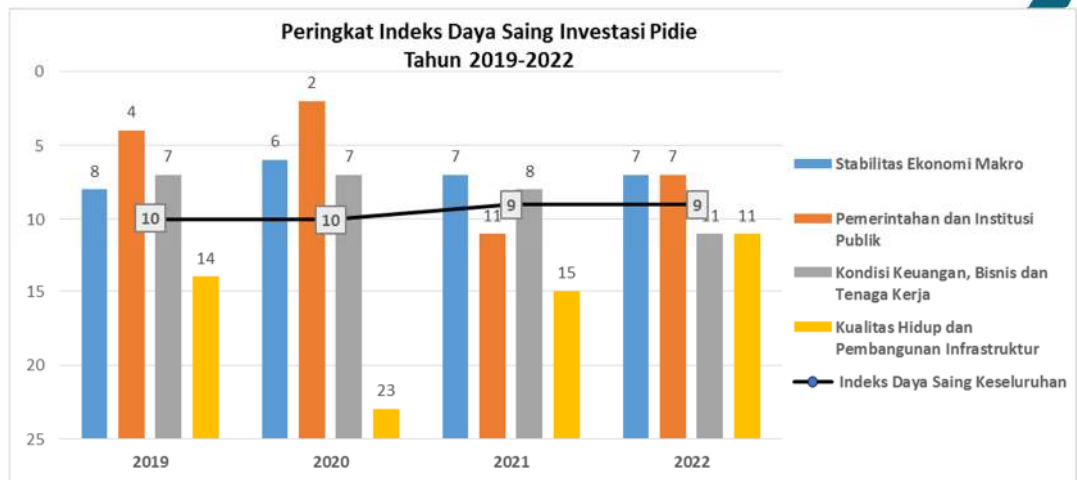
Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat daya saing Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar sebesar 0,137. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah kredit bermasalah, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan produktivitas keseluruhan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dapat meningkat sampai naik pada peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,665.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar sebesar -0,086. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan penduduk, jumlah ketersediaan pelabuhan dan bandara, jumlah rumah tangga dengan jaringan pipa air, penduduk menggunakan sambungan telepon, dan akses internet di rumah dan akses internet dengan telepon genggam, tingkat buta huruf, angka partisipasi SMP, angka harapan hidup saat lahir dan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Pidie dapat meningkat drastis sampai naik pada peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,389.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Pidie dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Pidie yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 9 akan meningkat menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

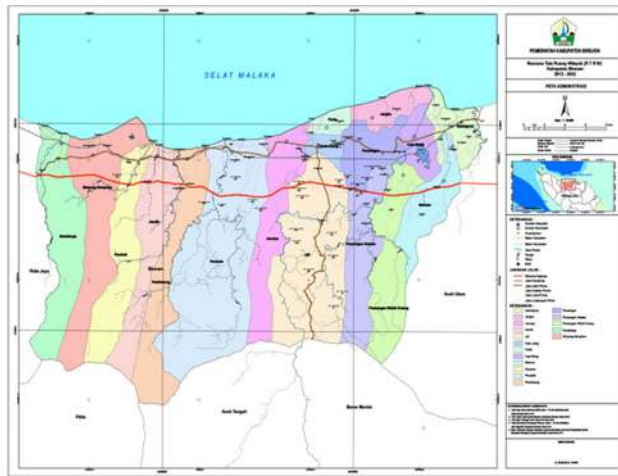
Tabel 2.20 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Pidie

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1.781	1	Memperluas program pendidikan keaksaraan, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi warga, hingga mengakselerasi layanan pada program pada daerah yang padat buta aksaranya.
persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-1.746	2	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.
Produktivitas industri Sekunder	-1.184	3	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0.862	4	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0.834	5	Memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, Perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0.827	6	Tingkatkan alokasi dana untuk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); lakukan penguatan kelembagaan SPAM.

Pertumbuhan Penduduk	-0.766	7	Pengembangan program transmigrasi.
Persentase Penduduk Menggunakan Komputer	-0.726	8	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Persentase Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0.716	9	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
PDRB per Kapita	-0.635	10	Dorong peningkatan dana transfer daerah; Efektifkan penggunaan dana otsus; tingkatkan perputaran uang di daerah melalui pengembangan program swadaya sandang/pangan; dorong peningkatan ekspor produk local.
Angka Harapan Hidup saat lahir	-0.617	11	Tingkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu hamil dan menyusui.
Tingkat Pengangguran	-0.615	12	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Produktivitas Keseluruhan	-0.601	13	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Jumlah Kredit Bermasalah	-0.578	14	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-0.554	15	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-0.543	16	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
PDRB per Kapita, nonmineral	-0.517	17	Dorong peningkatan dana transfer daerah.
Tingkat Kriminalitas	-0.477	18	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Produktivitas Keseluruhan, non migas	-0.472	19	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Produktivitas industri Tersier	-0.456	20	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

10. Kabupaten Bireuen

a. Gambaran Umum



Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.796,32 Km² atau 3,16% dari luas wilayah Provinsi Aceh.

Menurut data BPS pada Tahun 2021 Kabupaten Bireuen memiliki jumlah penduduk sebanyak 439.788 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) di Kabupaten Bireuen pada Tahun 2021 adalah 65,91 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,32 yang mengalami kenaikan dari tahun lalu. Hal ini diakibatkan karena dorongan kenaikan yang tinggi pada TPT perempuan.

PDRB ADHB Kabupaten Bireuen Tahun 2021 mencapai 14.054,53 miliar rupiah, sedangkan PDRB ADHK mencapai 10.374,48 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari nilai PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen pada Tahun 2021 sebesar 4,13%. Struktur perekonomian Kabupaten Bireuen pada Tahun 2021 didominasi oleh sektor pertanian, yaitu mencapai 33,62%.

Berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bireuen, ada 3 sektor yang menjadi fokus pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bireuen, yaitu pengembangan argoindustri (pengembangan argoindustri berbasis tanaman pangan, pengembangan argoindustri berbasis komoditas perkebunan, pengembangan argoindustri berbasis komoditas perikanan), pengembangan pariwisata (wisata pantai/bahari) dan pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Bireuen pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp63.183.357.665,-. Angka tersebut setara dengan 0,45% PDRB Tahun 2020.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Bireuen adalah di sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai investasi Rp627.660.054.334,- dan diikuti dengan sektor Pertanian, Perkebunan dan perikanan dengan nilai investasi sebesar Rp458.876.816.097,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Bireuen terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Peringkat Daya Saing Kabupaten Bireuen

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		4 0,753		2 1,335	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	6	6	Peringkat	5	2
Nilai Terstandar	0,772	0,983	Nilai Terstandar	0,750	1,073
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	3	2	Peringkat	7	1
Nilai Terstandar	0,922	1,266	Nilai Terstandar	0,567	2,017

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 4 dengan nilai terstandar sebesar 0,753. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,335 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 2. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Bireuen akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,772. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pembentukan modal tetap bruto, rata-rata penanaman modal asing dalam 3 tahun terakhir, dan rata-rata penanaman modal domestik dalam 3 tahun terakhir. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Bireuen dapat meningkat dengan nilai terstandar sebesar 0,983.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,750. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pendapatan pajak per pendapatan total Pemda dan tingkat kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Bireuen dapat meningkat sampai peringkat 2 dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dengan nilai terstandar 1,073.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

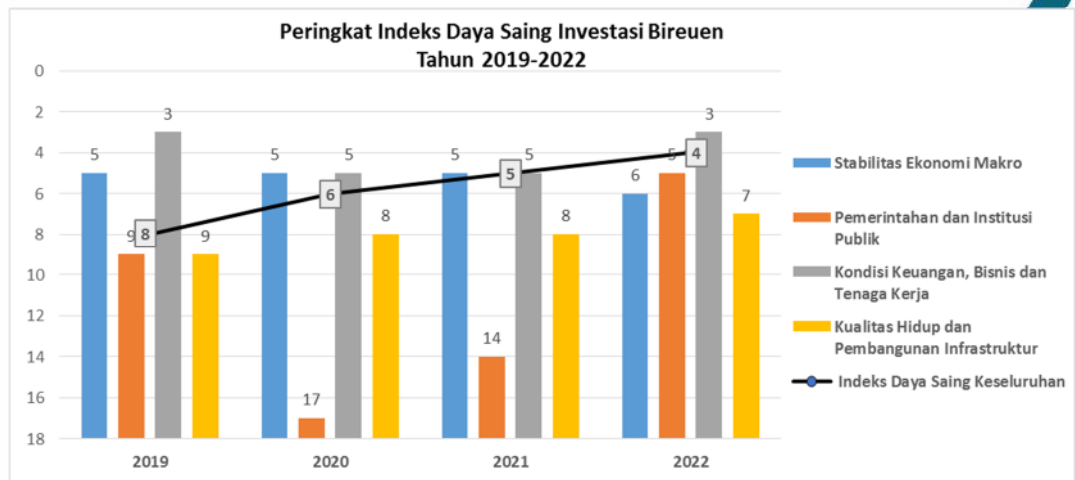
Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 3 dengan nilai terstandar sebesar 0,922. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain penduduk per jumlah cabang/kantor bank, produktivitas keseluruhan, produktivitas industri sekunder dan tersier. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Bireuen dapat meningkat sampai peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,266.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,567. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan penduduk, panjang jalan beraspal, jumlah kendaraan bermotor, ketersediaan pelabuhan dan bandara, penduduk yang menggunakan komputer, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (SMA), rasio gini dan rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bireuen dapat meningkat sampai peringkat 1 dengan nilai terstandar 2,017.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



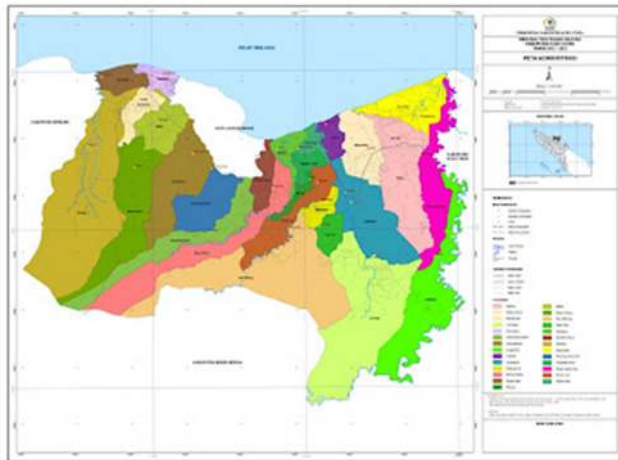
Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Bireuen dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Bireuen yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 4 akan meningkat menjadi peringkat 2 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Bireuen

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	-2.190	1	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-1.254	2	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Pertumbuhan Penduduk	-1.212	3	Pengembangan program transmigrasi.
Produktivitas industri Sekunder	-1.167	4	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-1.109	5	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0.862	6	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-0.812	7	Dorong pembukaan kantor cabang Bank.
Tingkat Kriminalitas	-0.671	8	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.

Produktivitas Keseluruhan	-0.506	9	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-0.495	10	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0.491	11	Meningkatkan promosi investasi.
Produktivitas Keseluruhan, non migas	-0.376	12	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
% Penduduk Menggunakan Komputer	-0.370	13	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Rasio Gini	-0.292	14	Kembangkan kegiatan padat karya; beri insentif untuk kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja; bansos untuk masyarakat sangat miskin.
Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0.272	15	Meningkatkan promosi investasi.
Jumlah ketersediaan bandara	-0.249	16	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Produktivitas industri Tersier	-0.238	17	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	-0.213	18	Peningkatan penerimaan pajak bisa juga dilakukan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan, mengembangkan pengolahan data dan informasi perpajakan.
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0.212	19	Dorong pengembangan industri dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri, peningkatan investasi.
Rata-rata Lama Sekolah	-0.188	20	Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang Pendidikan.

11. Kabupaten Aceh Utara
a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 3.296,86 km². Menurut data BPS pada Tahun 2020 Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 608.106 orang.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku 2010 pada Tahun 2021 mencapai 23,192 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,489 triliun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai 19,702 triliun rupiah.

Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi Berdasarkan harga konstan 2010. Angka PDRB mengalami hal sebaliknya yakni penurunan dari 17,017 triliun rupiah pada Tahun 2020 menjadi 16,924 triliun rupiah pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2021 Kabupaten Aceh Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sekitar -0,55%. Penurunan ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp579.140.270.076,- meningkat 29,12% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 2,50% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Utara adalah di sektor industri pengolahan dengan nilai investasi Rp425.316.511.137,-, dengan bidang usaha Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer nilai investasi sebesar Rp362.767.606.908,-.

Tabel 2.23 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Utara

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		3		2	
Nilai Terstandar		0,818		1,445	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	5	4	Peringkat	8	2
Nilai Terstandar	1,031	1,391	Nilai Terstandar	0,445	1,086
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	2	2	Peringkat	6	3
Nilai Terstandar	1,171	1,652	Nilai Terstandar	0,624	1,652

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 3 dengan nilai terstandar sebesar 0,818. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,445 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 2. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Utara akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 1,031. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, inflasi dan keterbukaan dalam perdagangan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Utara dapat meningkat pada peringkat 4 dengan nilai terstandar 1,391.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar sebesar 0,948. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah tingkat penyelesaian kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Utara dapat meningkat menjadi peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,086.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

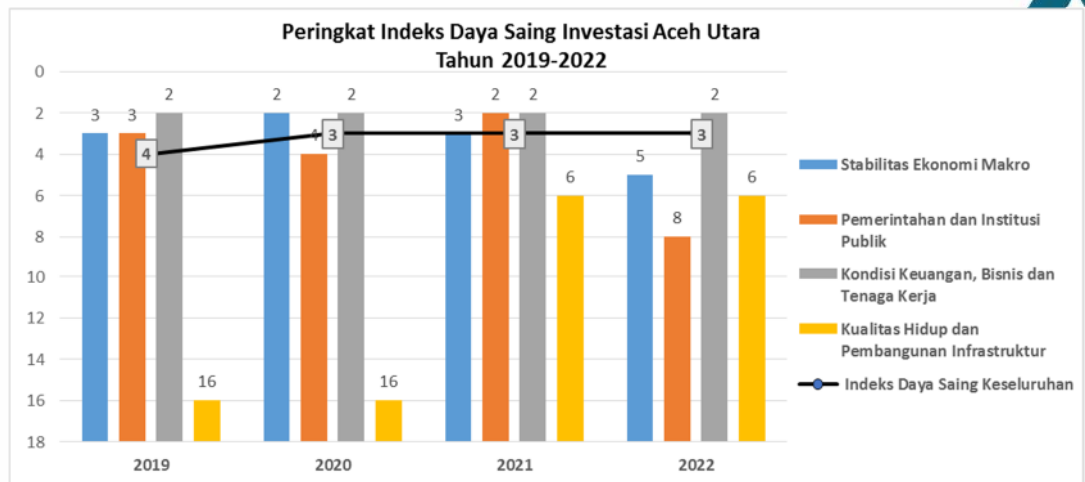
Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,171. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain penduduk per jumlah cabang/kantor bank, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, produktivitas keseluruhan dan produktivitas industri sekunder. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan nilai terstandar menjadi 1,652.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,624. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan penduduk, jumlah ketersediaan pelabuhan, penduduk menggunakan sambungan telepon, telepon genggam dan komputer, akses internet di rumah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (SMA), indeks pembangunan manusia, dan rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Utara dapat meningkat menjadi peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,652.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario What-If, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Utara dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Utara yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 3 akan meningkat menjadi peringkat 2 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

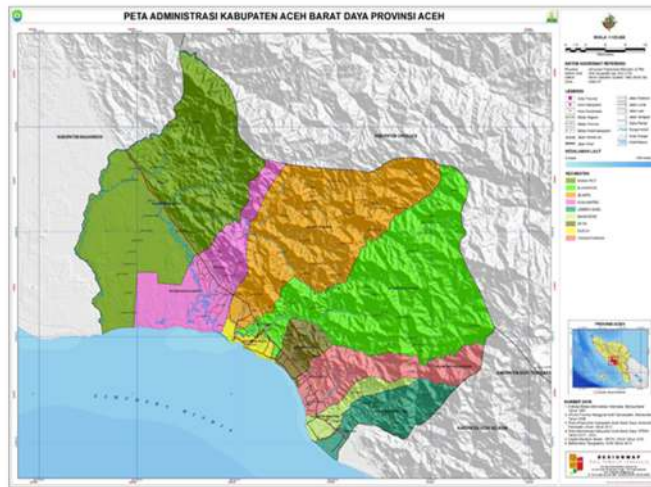
Tabel 2.24 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Utara

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Inflasi [R]	-2.449	1	Lakukan operasi pasar reguler; tingkatkan kapasitas lokal untuk pemenuhan kebutuhan.
Pertumbuhan PDRB	-2.216	2	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Akses Internet di Rumah	-1.764	3	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-1.453	4	Mengikutsertakan masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-1.377	5	Dorong pembukaan kantor cabang Bank.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-1.179	6	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-1.131	7	Memaksimalkan angkatan kerja yang menganggur untuk wirausaha atau kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
PDRB per Kapita, nonmineral	-1.086	8	Dorong peningkatan dana transfer daerah.
Tingkat Pengangguran	-1.046	9	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Produktivitas Keseluruhan, non migas	-1.006	10	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Pertumbuhan Penduduk	-0.939	11	Pengembangan program transmigrasi.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0.862	12	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Persentase Penduduk Menggunakan Komputer	-0.858	13	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Rata-rata Lama Sekolah	-0.760	14	Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang Pendidikan.
Persentase Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0.716	15	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Produktivitas industri Sekunder	-0.527	16	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-0.519	17	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Indeks Pembangunan Manusia	-0.443	18	Sinergitas antara Pemprov dan Kab/Kota untuk peningkatan angka IPM; manfaatkan Tehnologi Informasi dan Komukasi (TIK) untuk meningkatkan penyetaraan.
Keterbukaan dalam Perdagangan	-0.372	19	Tingkatkan aktivitas ekspor dibanding impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor.
Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-0.297	20	Perekrutan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

12. Kabupaten Aceh Barat Daya

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.882,05 km². Menurut data BPS pada Tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki jumlah penduduk sebanyak 152.657 orang, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp27.085.865,70,-

Pada tahun yang sama tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 2,88%.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Barat Daya pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp607.655.852.522,-. Angka tersebut setara dengan 15,7% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di kabupaten Aceh Barat Daya adalah di sektor industri Pengolahan nilai investasi Rp574.273.001.961,-. Bidang usaha yang mendukung capaian realisasi investasi adalah bidang usaha Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp546.000.000.000,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Barat Daya

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		21		15	
Nilai Terstandar		-0,961		-0,194	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	12	11	Peringkat	22	15
Nilai Terstandar	-0,408	-0,202	Nilai Terstandar	-1,359	-0,335
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	17	15	Peringkat	20	9
Nilai Terstandar	-0,796	-0,530	Nilai Terstandar	-1,284	0,290

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 21 dengan nilai terstandar sebesar -0,961. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi -0,194 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 15. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 12 dengan nilai terstandar sebesar -0,408. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah PDRB dan ekspor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkat menjadi peringkat 11 dengan nilai terstandar -0,202.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -1,359. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah tingkat penyelesaian kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkat menjadi peringkat 15 dengan nilai terstandar -0,335.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

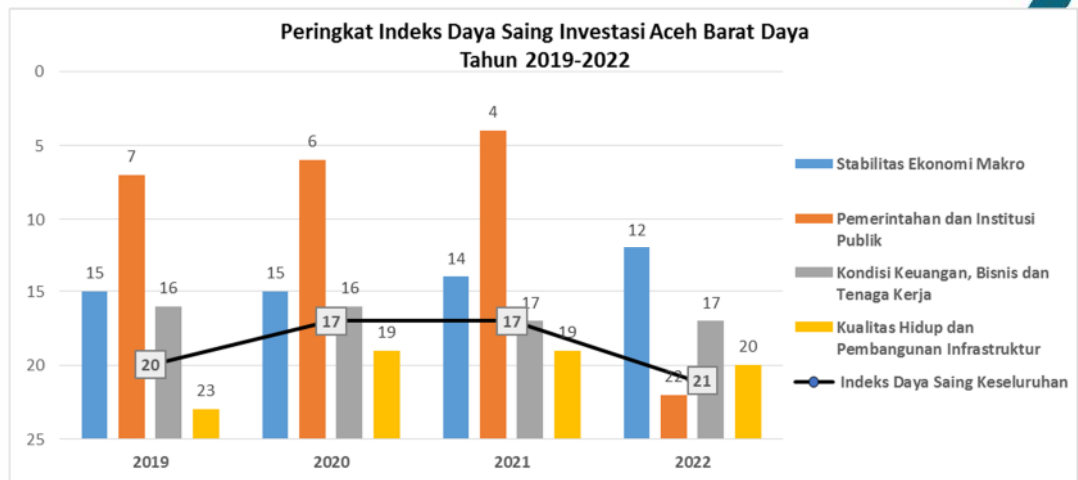
Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar sebesar -0,796. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah angka kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkat pada peringkat 15 dengan nilai terstandar -0,530.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 20 dengan nilai terstandar sebesar -1,284. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah penduduk perkotaan, panjang jalan beraspal, jumlah rumah tangga dengan jaringan pipa air, penduduk menggunakan sambungan telepon, tingkat buta huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (SD dan SMP), rasio murid per guru (SMA), indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup saat lahir dan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkat pada peringkat 9 dengan nilai terstandar 0,290.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario What-If, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 21 akan meningkat menjadi peringkat 15 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.26 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat Daya

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-2,282	1	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-1,662	2	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,477	3	Tingkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu hamil dan menyusui.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-1,223	4	Memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, Perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,024	5	memperluas program pendidikan keaksaraan, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi warga, hingga mengakselerasi layanan pada program pada daerah yang padat buta aksaranya.

Indeks Pembangunan Manusia	-0,997	6	Sinergitas antara Pemprov dan Kab/Kota untuk peningkatan angka IPM; manfaatkan Tehnologi Informasi dan Komukasi (TIK) untuk meningkatkan penyetaraan.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-0,878	7	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-0,851	8	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,794	9	Tingkatkan alokasi dana untuk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); lakukan penguatan kelembagaan SPAM.
Rata-rata Lama Sekolah	-0,734	10	memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antaranjang Pendidikan.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,724	11	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Persentase Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0,716	12	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
PDRB, nonmineral	-0,691	13	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,687	14	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Jumlah Angkatan Kerja	-0,674	15	Meningkatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja.
Jumlah Penduduk Bekerja	-0,658	16	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Penduduk Perkotaan	-0,648	17	-
Ekspor, nonmigas	-0,639	18	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Ekspor	-0,639	19	
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-0,633	20	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2016 s.d 2020 realisasi investasi terbesar di kabupaten Gayo Lues adalah di sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai investasi Rp33.000.000.000,- dan diikuti sektor Pengadaan listrik dan Gas nilai investasi sebesar Rp10.199.230.000,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Gayo Lues terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Peringkat Daya Saing Kabupaten Gayo Lues

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		20 - 0,936		9 0,171	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	20	14	Peringkat	16	16
Nilai Terstandar	-0,914	-0,455	Nilai Terstandar	-0,495	-0,495
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	20	15	Peringkat	21	3
Nilai Terstandar	-1,046	-0,326	Nilai Terstandar	-1,289	1,195

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 20 dengan nilai terstandar sebesar -0,936. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,171 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 9. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Gayo Lues akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi**1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro**

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 20 dengan nilai terstandar sebesar -0,914. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah PDRB, ekspor dan impor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Gayo Lues dapat meningkat pada peringkat 14 dengan nilai terstandar -0,455.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,495.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 20 dengan nilai terstandar sebesar -1,046. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah kredit bermasalah, jumlah layanan perbankan, jumlah pekerja di sektor tersier dan produktivitas industri primer. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Gayo Lues dapat meningkat pada peringkat 15 dengan nilai terstandar -0,326.

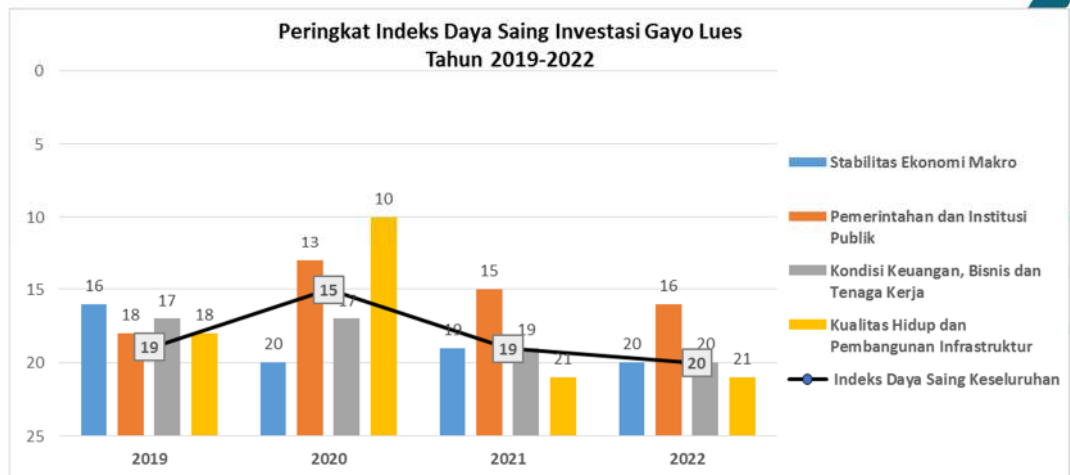
4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 21 dengan nilai terstandar sebesar -1,289. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah penduduk, rumah tangga dengan sambungan listrik, penduduk menggunakan telepon genggam, akses internet di rumah, tingkat buta huruf, rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup saat lahir, rasio penduduk per jumlah tenaga kesehatan dan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Gayo Lues dapat meningkat drastis pada peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,195.



c. Perbaikan Daya Saing Investasi



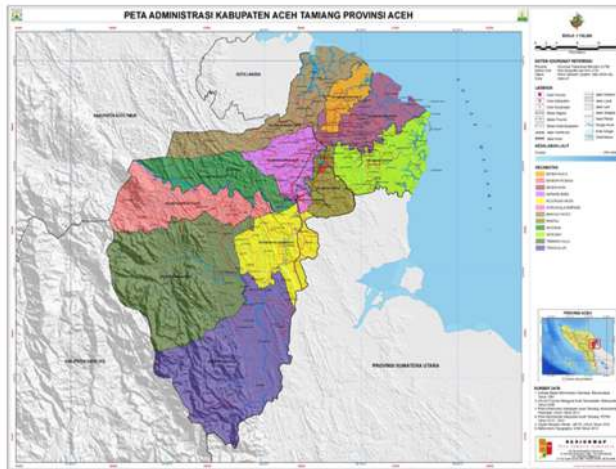
Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Gayo Lues dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Gayo Lues yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 20 akan meningkat menjadi peringkat 9 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Gayo Lues

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	-4,637	1	-
Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-2,244	2	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-2,229	3	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.
Akses Internet di Rumah	-1,861	4	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,850	5	Memperluas program pendidikan keaksaraan, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi warga, hingga mengakselerasi layanan pada program pada daerah yang padat buta aksaranya.
Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,263	6	Tingkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu hamil dan menyusui.
Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-1,229	7	Dorong pembukaan kantor cabang Bank.
Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-1,141	8	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-1,093	9	Perekrutan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-0,971	10	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Rata-rata Lama Sekolah	-0,971	11	memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang Pendidikan.
PDRB, nonmineral	-0,969	12	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Produktivitas industri Primer	-0,956	13	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Jumlah Penduduk	-0,937	14	-
Impor	-0,935	15	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Impor, nonmigas	-0,935	16	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,915	17	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Ekspor	-0,904	18	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Ekspor, nonmigas	-0,904	19	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Jumlah Layanan Perbankan	-0,902	20	Dorong pembukaan layanan perbankan.

14. Kabupaten Aceh Tamiang
a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.957,025 Km². Pada Tahun 2021, komposisi penduduk Aceh Tamiang terdiri dari 150.897 jiwa laki-laki atau sebanyak 50,72%, dan 146.625 jiwa perempuan atau sebanyak 49,28%.

Sektor andalan Kabupaten Aceh Tamiang adalah sektor usaha pertanian. Hal ini dapat terlihat dalam penghitungan PDRB Aceh Tamiang Tahun 2021, kontribusi terbesar ekonomi Aceh Tamiang berada pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Tamiang Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2021 mencapai 8,85 triliun rupiah. Secara nominal, kinerja perekonomian Aceh Tamiang meningkat jika dilihat dari nilai PDRB Aceh Tamiang atas dasar harga berlaku yang mengalami kenaikan sebesar 1,34 triliun rupiah dari Tahun 2020. Pada Tahun 2021, PDRB ADHB migas mengalami peningkatan sebesar 2,33 triliun rupiah dari 6,51 triliun rupiah di Tahun 2017. Naiknya PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha dan juga dipengaruhi oleh inflasi.

Pada Tahun 2021, nilai PDRB Aceh Tamiang atas dasar harga konstan 2010, mencapai 6,06 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 6,01 triliun rupiah dari Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,88%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 0,42%.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp412.232.071.074,-. Angka tersebut setara dengan 4,65% PDRB Tahun 2021. Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang adalah di sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar Rp313.354.277.936,- diikuti Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai investasi sebesar Rp42.987.234.247 dan Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai investasi Rp33.616.635.626,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Tamiang

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		17		9	
Nilai Terstandar		-0,472		0,262	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	13	11	Peringkat	19	12
Nilai Terstandar	-0,420	-0,151	Nilai Terstandar	-0,769	0,090
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	10	7	Peringkat	18	6
Nilai Terstandar	0,187	0,540	Nilai Terstandar	-0,887	0,569

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar sebesar -0,472. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,262, disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 9. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Tamiang akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar -0,420. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita dan inflasi. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkat sampai peringkat 11 dengan nilai terstandar -0,151.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan ke 19 dengan nilai terstandar sebesar -0,769. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah tingkat kriminalitas dan penyelesaian kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkat sampai peringkat 12 dengan nilai terstandar 0,090.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

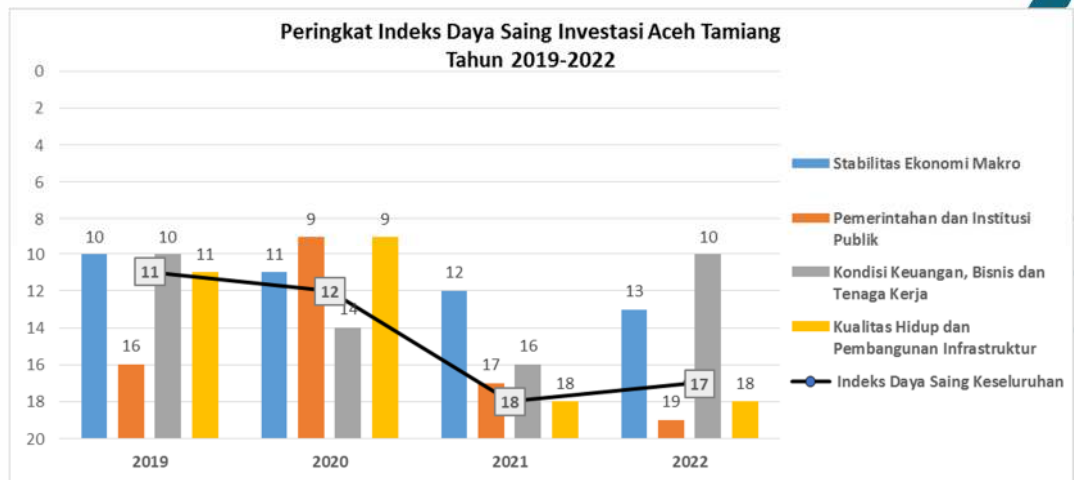
Dilihat dari lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,187. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah kredit bermasalah, produktivitas industri sekunder dan tersier. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkat sampai peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,540.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar -0,887. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan penduduk, ketersediaan pelabuhan, akses internet di kantor dan di sekolah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (SD), rasio murid per guru (SD, SMP dan SMA), rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama dan tenaga kesehatan.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkat drastis sampai peringkat 6 dengan nilai terstandar 0,569.

c. Perbaiki Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Tamiang yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 17 akan meningkat menjadi peringkat 9 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

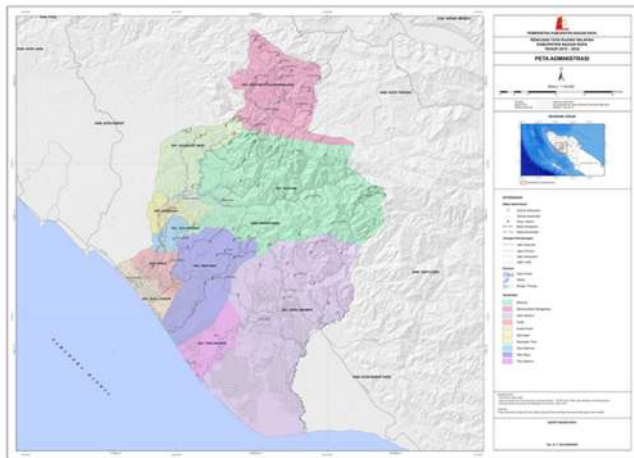
Tabel 2.30 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Tamiang

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Inflasi [R]	-2,105	1	Lakukan operasi pasar reguler; tingkatkan kapasitas lokal untuk pemenuhan kebutuhan harian.
Pertumbuhan PDRB	-1,596	2	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-1,552	3	Perekrutan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-1,520	4	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-1,380	5	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-1,332	6	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Produktivitas industri Tersier	-1,235	7	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-1,177	8	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-1,144	9	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-1,116	10	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,862	11	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Akses Internet di Kantor	-0,847	12	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Jumlah Kredit Bermasalah	-0,624	13	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Akses Internet di Sekolah	-0,591	14	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Produktivitas industri Sekunder	-0,564	15	Implementasi industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Tingkat Kriminalitas	-0,557	16	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Produktivitas Keseluruhan, non migas	-0,556	17	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Rata-rata Lama Sekolah	-0,522	18	Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang Pendidikan.
PDRB per Kapita, nonmineral	-0,482	19	Dorong peningkatan dana transfer daerah; Efektifkan penggunaan dana otsus; tingkatkan perputaran uang di daerah melalui pengembangan program swadaya sandang/pangan; dorong peningkatan ekspor produk lokal.
Pertumbuhan Penduduk	-0,444	20	Pengembangan program transmigrasi.

15. Kabupaten Nagan Raya

a. Gambaran Umum



Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 3.544,90 km². Menurut data BPS pada Tahun 2021 Kabupaten Nagan Raya memiliki jumlah penduduk sebanyak 170.591 orang. Nilai PDRB Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku Tahun 2021 sebesar

9.183,604 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB pada Tahun 2021 sebesar 5,34, dengan distribusi terbesar dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 44,94% atau sebesar 4.127,53 miliar rupiah.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.348.071.282.571,-. Angka tersebut setara dengan 25,57% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Nagan Raya, ada 5 sektor yang menjadi fokus pengembangan penanaman modal di Kabupaten Nagan Raya, yaitu pengembangan argoindustri (pengembangan argoindustri berbasis tanaman pangan, pengembangan argoindustri berbasis komoditas perkebunan, pengembangan komoditas perikanan), pengembangan argo bisnis yang dilakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan daya saing, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di kabupaten Nagan Raya adalah di sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai investasi sebesar Rp2.171.918.582.905,- dan diikuti dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai investasi sebesar Rp70.849.583.213,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Nagan Raya terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.31 Peringkat Daya Saing Kabupaten Nagan Raya

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		8		3	
Nilai Terstandar		0,330		0,960	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	2	2	Peringkat	18	12
Nilai Terstandar	1,596	1,744	Nilai Terstandar	-0,674	0,284
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	7	5	Peringkat	15	5
Nilai Terstandar	0,541	0,850	Nilai Terstandar	-0,141	0,964

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar sebesar 0,330. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,960 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 3. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Nagan Raya akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,596. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB industri tersier, inflasi dan rata-rata penanaman modal domestik dalam 3 tahun terakhir. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Nagan Raya dapat meningkat sampai naik dengan nilai terstandar 1,744.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat daya saing Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar -0,674. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah pendapatan pajak Pemda dan evaluasi kinerja Pemda. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Nagan Raya dapat meningkat sampai peringkat 12 dengan nilai terstandar 0,284.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

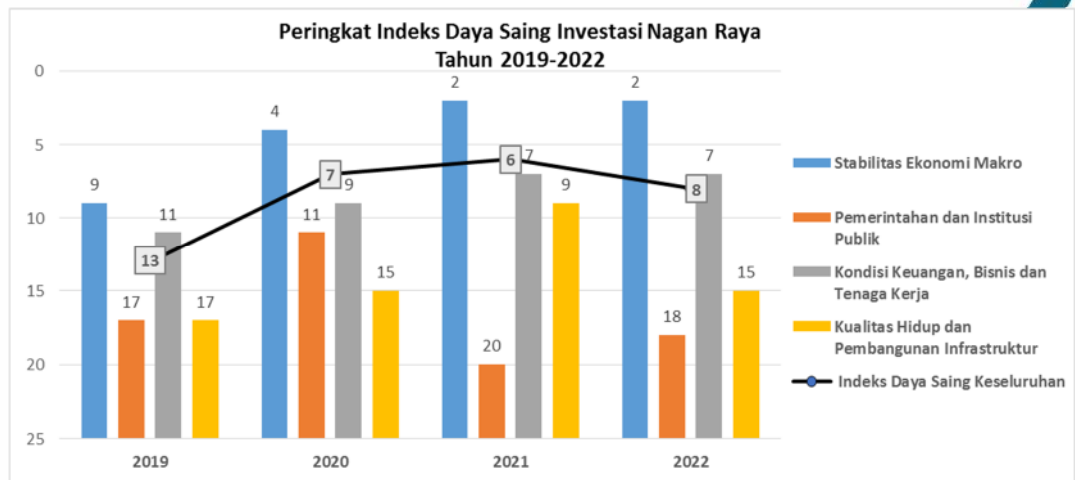
Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,541. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain total tabungan dan deposito di bank, jumlah layanan perbankan, jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja, jumlah pekerja di sektor sekunder dan tersier. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagan Raya dapat meningkat sampai peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,850.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,141. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah penduduk dan penduduk perkotaan, panjang jalan beraspal, jumlah ketersediaan pelabuhan, jumlah rumah tangga dengan jaringan pipa air, penduduk menggunakan sambungan telepon dan komputer, rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Nagan Raya dapat meningkat drastis sampai peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,964.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Nagan Raya dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Nagan Raya yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 8 akan meningkat menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Nagan Raya

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Evaluasi Kinerja Pemda	-1,652	1	Tingkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Inflasi [R]	-1,512	2	Lakukan operasi pasar reguler; tingkatkan kapasitas lokal untuk pemenuhan kebutuhan harian.
Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,943	3	Tingkatkan alokasi dana untuk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); lakukan penguatan kelembagaan SPAM.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,862	4	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Penduduk Perkotaan	-0,835	5	-
Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0,772	6	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Persentase Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0,716	7	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Rata-rata Lama Sekolah	-0,716	8	Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang Pendidikan.
Jumlah Layanan Perbankan	-0,513	9	Dorong pembukaan layanan perbankan.
Total Tabungan dan Deposito di Bank	-0,510	10	Tingkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menabung.

Indeks Pembangunan Manusia	-0,477	11	Sinergitas antara Pemprov dan Kab/Kota untuk peningkatan angka IPM; manfaatkan Tehnologi Informasi dan Komukasi (TIK) untuk meningkatkan penyetaraan.
Jumlah Penduduk	-0,439	12	-
Jumlah Angkatan Kerja	-0,433	13	Meningkatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja.
Jumlah Penduduk Bekerja	-0,421	14	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Persentase Penduduk Menggunakan Komputer	-0,413	15	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
PDRB Industri Tersier	-0,362	16	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri Tersier.
Pendapatan Pajak Pemda	-0,335	17	Tingkatkan PAD daerah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pemungutan PAD.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,332	18	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,289	19	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,253	20	Meningkatkan promosi investasi.

16. Kabupaten Aceh Jaya

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 3.814 Km². Menurut data BPS pada Tahun 2021 Kabupaten Aceh Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 94.418 orang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan angka yang positif selama 2017-2021 kecuali pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 yang menyebabkan penurunan produksi tahun tersebut. Pada Tahun 2021, kondisi perekonomian sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya sebesar 2,59%.

Nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan peningkatan dari Tahun 2017-2021. Tahun 2021 nilai PDRB ADHK telah mencapai 2,03 triliun rupiah atau naik sebanyak 51,4 miliar rupiah dari Tahun 2020. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh penurunan produksi di beberapa lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan berbeda dalam pembentukan PDRB Aceh Jaya Tahun 2021 dihasilkan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 31,68%. Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp16.312.700.887,-. Angka tersebut setara dengan 0,57% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Jaya adalah pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai investasi sebesar Rp9.868.498.934,- dan diikuti dengan sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai investasi sebesar Rp5.014.201.953,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Jaya terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Jaya

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		13		5	
Nilai Terstandar		0,007		0,565	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	16	11	Peringkat	6	6
Nilai Terstandar	-0,560	-0,129	Nilai Terstandar	0,587	0,587
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	15	12	Peringkat	8	2
Nilai Terstandar	-0,538	0,018	Nilai Terstandar	0,538	1,782

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar 0,007. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,565 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 5. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Jaya akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,560. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah PDRB, ekspor dan impor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkat menjadi peringkat 11 dengan nilai terstandar -0,129.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,587.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

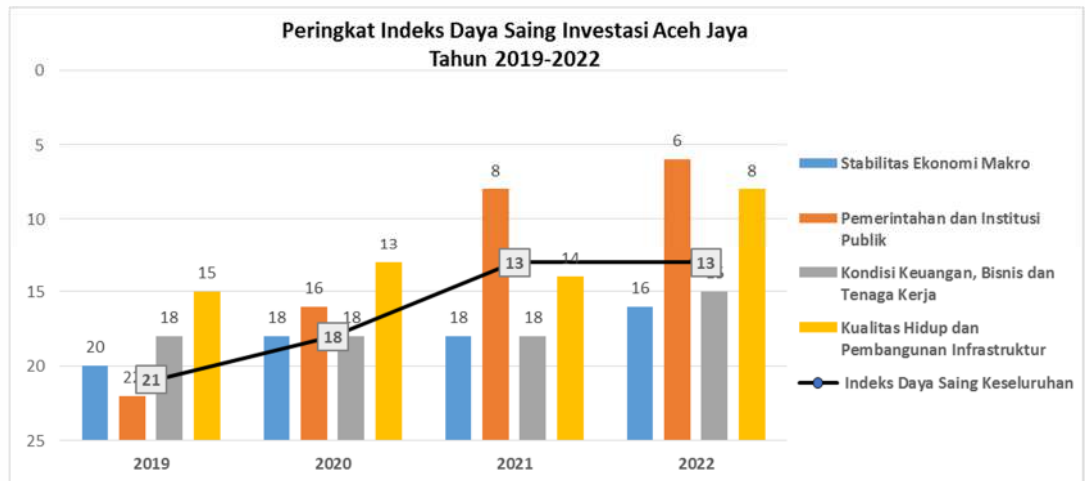
Dilihat dari lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,644. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain total pinjaman bank, jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja, jumlah pekerja di sektor sekunder dan tersier, serta produktivitas industri primer. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkat menjadi peringkat 12 dengan nilai terstandar 0,018.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar sebesar 0,538. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah penduduk dan penduduk perkotaan, panjang jalan beraspal, akses

internet di sekolah, tingkat buta huruf, angka partisipasi sekolah (SD dan SMP) dan rasio gini. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkat sampai peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,782.

c. Perbaiki Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Jaya dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Jaya yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 13 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

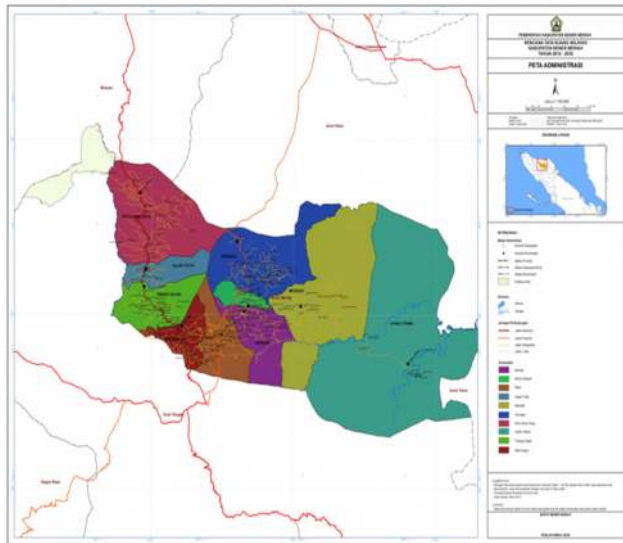
Tabel 2.34 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Aceh Jaya

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-1,903	1	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Akses Internet di Sekolah	-1,817	2	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,180	3	Memperluas program pendidikan keaksaraan, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi warga, hingga mengakselerasi layanan pada program pada daerah yang padat buta aksaranya.
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-1,093	4	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan dan penggalangan dana pendidikan 12 thn.

Penduduk Perkotaan	-1,067	5	-
Jumlah Penduduk	-0,985	6	-
PDRB, nonmineral	-0,969	7	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,916	8	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Jumlah Angkatan Kerja	-0,900	9	Meningkatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,900	10	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Jumlah Penduduk Bekerja	-0,887	11	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Ekspor, nonmigas	-0,874	12	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Ekspor	-0,874	13	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0,848	14	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,838	15	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Total Pinjaman Bank	-0,814	16	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Rasio Gini	-0,807	17	Kembangkan kegiatan padat karya; beri insentif untuk kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja; bansos untuk masyarakat sangat miskin.
Produktivitas industri Primer	-0,802	18	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Impor	-0,801	19	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Impor, nonmigas	-0,801	20	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.

17. Kabupaten Bener Meriah

a. Gambaran Umum



Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.941,61 km². Berdasarkan Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020 (September) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 diperkirakan ada sebanyak 164.522 orang.

Berdasarkan data Tahun 2021, angka PDRB Kabupaten Bener Meriah Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan mencapai 4.958,94 miliar rupiah. Pada Tahun 2021, distribusi PDRB terbanyak adalah pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 51,09% dari total keseluruhan PDRB. Sedangkan Sektor Konstruksi menempati urutan kedua dengan porsi 15,36%. Persentase terkecil datang dari Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, yaitu 0,02%. Laju pertumbuhan PDRB di Tahun 2021 sebesar 3,15%. Angka tersebut naik 3,06 dari Tahun 2020 yang berjumlah 0,09%.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp16.451.422.256,- meningkat 4,29% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 0,33% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi terbesar di Kabupaten Bener Meriah adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai investasi Rp9.179.272.000,- dan diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai investasi sebesar Rp6.962.150.256,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Bener Meriah terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Peringkat Daya Saing Kabupaten Bener Meriah

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		10		3	
Nilai Terstandar		0,181		0,804	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	17	11	Peringkat	11	2
Nilai Terstandar	-0,592	-0,337	Nilai Terstandar	0,268	1,250
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	13	5	Peringkat	4	3
Nilai Terstandar	-0,035	0,598	Nilai Terstandar	1,082	1,705

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,181. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,804 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 3. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Bener Meriah akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar sebesar -0,592. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB, PDRB industri tersier dan rata-rata penanaman modal domestik dalam 3 tahun terakhir. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Bener Meriah dapat meningkat sampai peringkat 11 dengan nilai terstandar -0,337.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar sebesar 0,268. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pendapatan total Pemda dan pajak Pemda, pengeluaran Pemda dan tingkat penyelesaian kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Bener Meriah dapat meningkat drastis sampai peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,250.

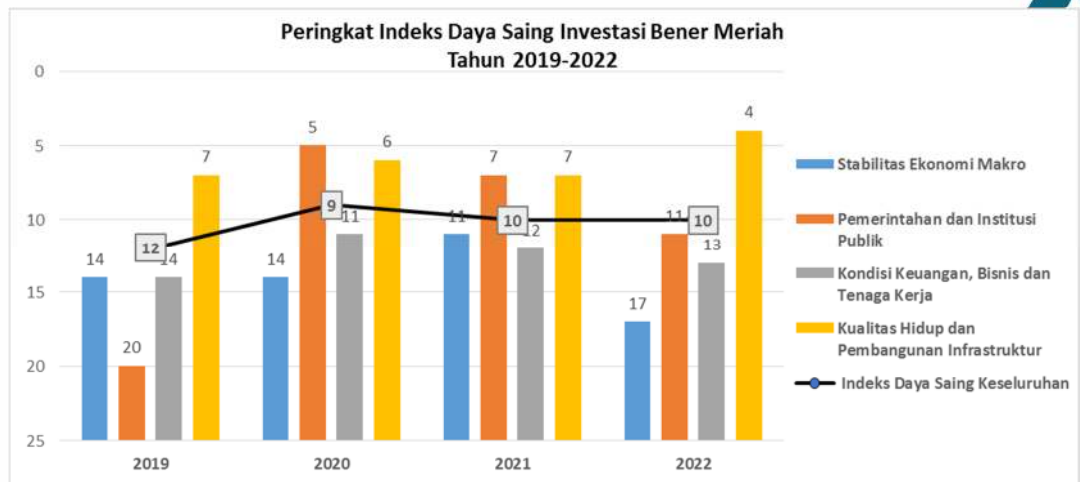
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar -0,035. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain total tabungan dan deposito di bank, pinjaman bank, jumlah kredit bermasalah, jumlah layanan perbankan, pekerja di sektor sekunder dan tersier, produktivitas keseluruhan dan produktivitas industri primer. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah dapat meningkat sampai peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,598.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 4 dengan nilai terstandar sebesar 1,082. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain penduduk perkotaan, jumlah ketersediaan pelabuhan, angka partisipasi sekolah (SD) dan jumlah kejadian bencana alam. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bener Meriah dapat meningkat sampai peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,705

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



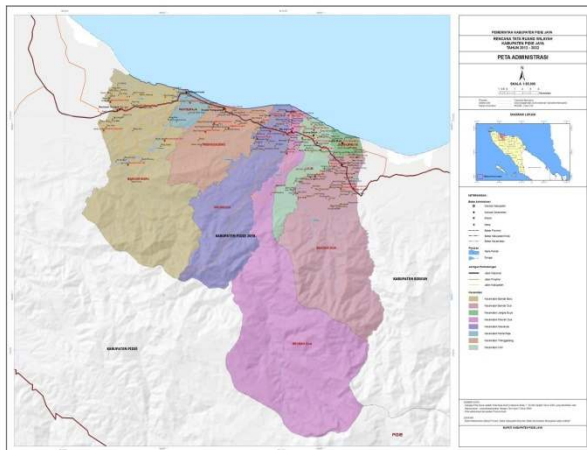
Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Bener Meriah dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Bener Meriah yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 10 akan meningkat menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Bener Meriah

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah kejadian bencana alam	-2,056	1	Aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk menyiapkan berbagai Langkah antisipasi guna meminilisir resiko bencana.
Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-1,604	2	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-1,093	3	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,969	4	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0,892	5	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,862	6	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Produktivitas industri Primer	-0,856	7	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-0,709	8	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
PDRB Industri Tersier	-0,643	9	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri Tersier.
Total Pinjaman Bank	-0,628	10	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman.
Pendapatan Pajak Pemda	-0,605	11	Tingkatkan PAD daerah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pemungutan PAD.
Produktivitas Keseluruhan	-0,604	12	Implementasi Industri 4.0 sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Penduduk Perkotaan	-0,573	13	-
Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,570	14	Meningkatkan promosi investasi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,541	15	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Total Tabungan dan Deposito di Bank	-0,521	16	Tingkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menabung.
Pendapatan Total Pemda	-0,517	17	Tingkatkan PAD daerah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pemungutan PAD.
Jumlah Layanan Perbankan	-0,513	18	Dorong pembukaan layanan perbankan.
PDRB, nonmineral	-0,512	19	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Pengeluaran Pemda	-0,509	20	Perencanaan yang matang dalam mengatur pengeluaran pemerintah daerah.

18. Kabupaten Pidie Jaya
a. Gambaran Umum



Kabupaten Pidie Jaya memiliki luas wilayah 1.190,41 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 dari hasil proyeksi, yaitu sebanyak 160.327 orang. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63% dibandingkan data penduduk Tahun 2020. Secara gender, jumlah penduduk laki-laki sebanyak

79.716 orang dan penduduk perempuan sebanyak 80.611 orang.

PDRB Pidie Jaya atas dasar harga berlaku pada Tahun 2017 adalah sebesar 3,01 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 3,67 triliun rupiah di Tahun 2021. Periode 2017-2021 PDRB ADHB Pidie Jaya naik sebanyak 656,67 miliar rupiah. Jika dilihat secara rata-rata, setiap tahunnya di periode 2017-2021 PDRB ADHB Pidie Jaya naik sebanyak 164,17 miliar rupiah per tahun.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp14.942.720.910,-. Angka tersebut setara dengan 0,41% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di kabupaten Pidie Jaya adalah di sektor Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor dengan nilai investasi Rp12.329.330.910,- dan diikuti dengan sektor konstruksi dengan nilai investasi sebesar Rp1.613.390.000,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Pidie Jaya terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Peringkat Daya Saing Kabupaten Pidie Jaya

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		16		9	
Nilai Terstandar		- 0,360		0,276	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	22	17	Peringkat	4	4
Nilai Terstandar	-0,994	-0,600	Nilai Terstandar	0,828	0,828
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	21	15	Peringkat	16	3
Nilai Terstandar	-1,117	-0,368	Nilai Terstandar	-0,156	1,244

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,360. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,276 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 9. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Pidie Jaya akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kabupaten Pidie Jaya berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -0,994. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB, PDRB per kapita, PDRB industri sekunder dan ekspor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkat drastis sampai peringkat 17 dengan nilai terstandar -0,600.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kabupaten Pidie Jaya berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar sebesar 0,828.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

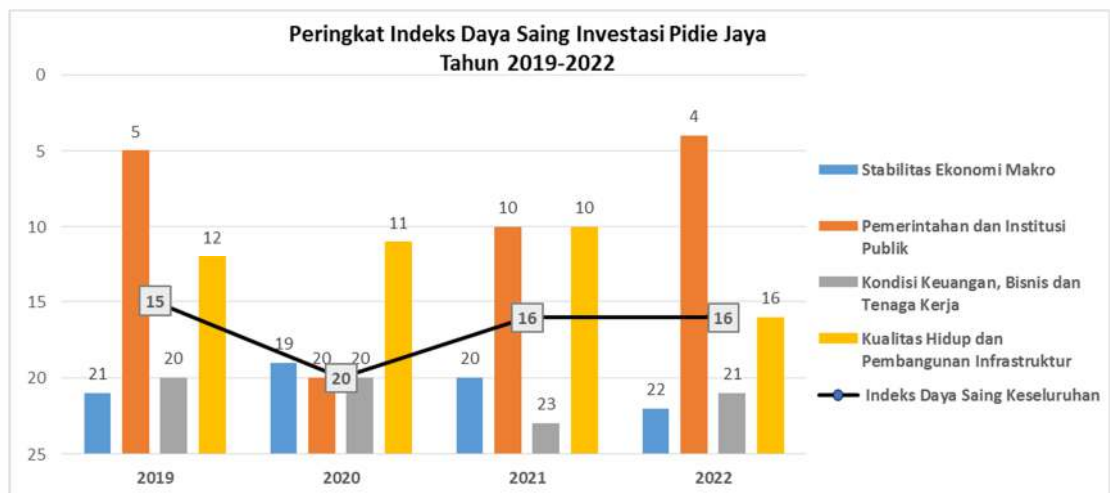
Dilihat dari lingkup Kondisi Keuangan Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kabupaten Pidie Jaya berada pada urutan ke 21 dengan nilai terstandar sebesar -1,117. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain total pinjaman bank, jumlah kredit bermasalah, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas keseluruhan, produktivitas industri sekunder dan tersier. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkat sampai peringkat 15 dengan nilai terstandar -0,368.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Pidie Jaya berada pada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,156. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah penduduk perkotaan, panjang jalan beraspal, ketersediaan pelabuhan, penduduk menggunakan telepon genggam, akses internet di rumah dan kantor, tingkat buta huruf dan angka partisipasi sekolah (SD).

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkat drastis sampai peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,244.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Pidie Jaya yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 16 akan meningkat menjadi peringkat 9 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Pidie Jaya

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-2,682	1	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-1,396	2	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Akses Internet di Rumah	-1,283	3	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Akses Internet di Kantor	-1,266	4	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-1,245	5	Memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, Perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-1,212	6	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Produktivitas industri Sekunder	-1,127	7	Implementasi industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Produktivitas industri Tersier	-1,081	8	Implementasi Industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
PDRB Industri Sekunder	-1,039	9	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri sekunder.
Ekspor, nonmigas	-0,963	10	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.

Ekspor	-0,963	11	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Penduduk Perkotaan	-0,910	12	-
Total Pinjaman Bank	-0,894	13	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,862	14	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
PDRB per Kapita	-0,858	15	Dorong peningkatan dana transfer daerah; Efektifkan penggunaan dana otsus; tingkatkan perputaran uang di daerah melalui pengembangan program swadaya sandang/pangan; dorong peningkatan ekspor produk lokal.
Produktivitas Keseluruhan	-0,809	16	Implementasi Industri 4.0 sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
PDRB, nonmineral	-0,792	17	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,791	18	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-0,773	19	Memperluas program pendidikan keaksaraan, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi warga, hingga mengakselerasi layanan pada program pada daerah yang padat buta aksaranya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,770	20	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.

19. Kota Banda Aceh

a. Gambaran Umum



Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah 61,36 km². Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi Juni 2021 yaitu 255.029 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 128.532 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 126.497 jiwa.

Pada Tahun 2021 Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku sebesar 19,93 triliun rupiah. Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Banda Aceh. Kontribusi lapangan usaha ini mencapai 23,73% yang diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai kontributor terbesar kedua sebesar 21,11%.

Walaupun pandemi Covid19 masih berlangsung, perekonomian Kota Banda Aceh sudah dapat bangkit kembali. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan sebesar 5,53% di Tahun 2021 setelah sebelumnya berkontraksi sebesar 3,39% di Tahun 2020.

Jumlah realisasi investasi Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp547.881.666.731,-. Angka tersebut setara dengan 2,75% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kota Banda Aceh adalah di sektor Informasi dan komunikasi dengan investasi Rp194.962.642.131,- dan diikuti dengan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai investasi sebesar Rp132.457.618.903,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kota Banda Aceh terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Peringkat Daya Saing Kota Banda Aceh

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		1 1,678		1 2,539	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	1	1	Peringkat	13	2
Nilai Terstandar	1,843	1,900	Nilai Terstandar	-0,182	1,486
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	1	1	Peringkat	1	1
Nilai Terstandar	3,132	3,302	Nilai Terstandar	1,920	3,468

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 1,678. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 2,539 dengan peringkat daya saing investasi tetap pada urutan ke 1. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kota Banda Aceh akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 1,843. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah PDRB industri primer dan keterbukaan dalam perdagangan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kota Banda Aceh dapat meningkat dengan nilai terstandar sebesar 1,900.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar -0,182. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pendapatan pajak per pendapatan total Pemda dan tingkat kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kota Banda Aceh dapat meningkat drastis sampai peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,486.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

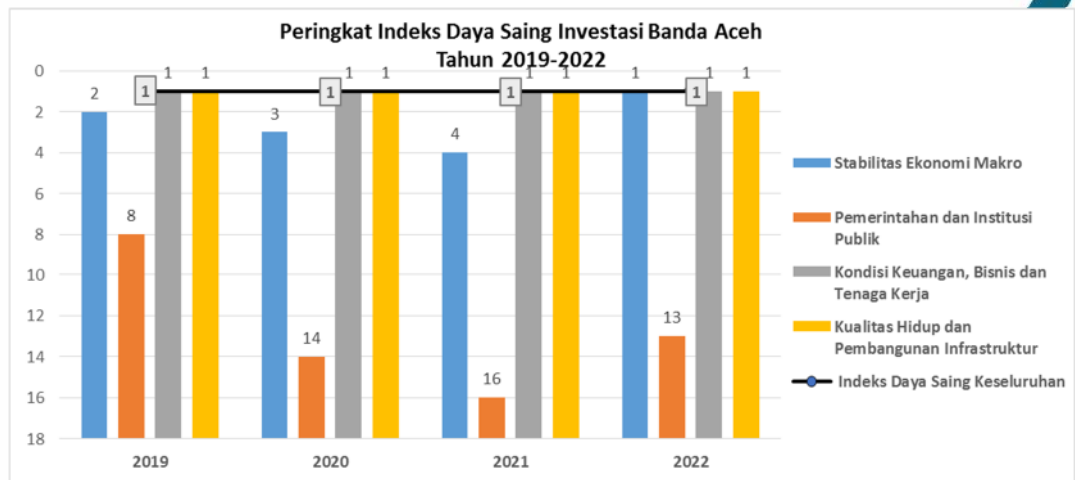
Dilihat dari lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 3,132. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah pekerja di sektor primer dan tingkat pengangguran. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dapat meningkat dengan nilai terstandar sebesar 3,302.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 1,920. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan penduduk, panjang jalan beraspal, jumlah kendaraan bermotor, jumlah ketersediaan bandara, kepemilikan rumah, akses internet dengan telepon genggam, angka partisipasi sekolah (SD dan SMP), rasio murid per guru (SD, SMP dan SMA), rasio gini dan rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Banda Aceh dapat meningkat dengan nilai terstandar sebesar 3,468.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kota Banda Aceh dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Banda Aceh yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 1 akan tetap berada pada peringkat ke 1 dengan peningkatan nilai daya saing. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.40 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Banda Aceh

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Persentase kepemilikan rumah	-3,614	1	Tingkatkan program bantuan pembangunan rumah untuk orang tidak mampu.
Tingkat Kriminalitas	-3,600	2	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-2,446	3	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-2,152	4	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-2,016	5	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Rasio Gini	-1,932	6	Kembangkan kegiatan padat karya; beri insentif untuk kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja; bansos untuk masyarakat sangat miskin.
Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-1,312	7	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Tingkat Pengangguran	-1,309	8	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Pertumbuhan Penduduk	-1,038	9	Pengembangan program transmigrasi.
Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-0,954	10	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

PDRB Industri Primer	-0,944	11	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri Primer.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,791	12	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0,543	13	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-0,541	14	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,392	15	Memaksimalkan para angkatan kerja yang menganggur untuk melakukan wirausaha atau melakukan kegiatan produksi yang sifatnya kreatif, Perlunya pemerintah untuk mendorong masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan hasil produksinya.
Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	-0,381	16	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Keterbukaan dalam Perdagangan	-0,328	17	Tingkatkan aktivitas ekspor dibanding impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor.
Jumlah ketersediaan bandara	-0,249	18	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-0,215	19	Alokasikan dana beasiswa untuk siswa berprestasi; tingkatkan peran masyarakat dalam penyediaan pendidikan; kerjasama pendanaan pendidikan dan penggalangan dana pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun.
Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	-0,213	20	Peningkatan penerimaan pajak bisa juga dilakukan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan, mengembangkan pengolahan data dan informasi perpajakan.

20. Kota Sabang

a. Gambaran Umum



Kota Sabang merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 153 Km². Menurut data BPS pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Sabang sebanyak 42.066 orang, laju pertumbuhan penduduk 2,82%. Nilai PDRB Kota Sabang atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,595 triliun rupiah.

Pada Tahun 2021, kategori lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Sabang yakni sebesar 33,78%. Kontribusi pada kategori lapangan usaha ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017, yakni sebesar 30,49%. Kemudian, kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi kedua terbesar setelah Konstruksi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Kontribusi kategori lapangan usaha ini terhadap PDRB pada Tahun 2021 adalah sebesar 15,33%. Selanjutnya, kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap PDRB Kota Sabang Tahun 2021 adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai kontribusi sebesar 14,67%.

Jumlah realisasi investasi Kota Sabang pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp41.078.474.000,-. Total investasi tersebut setara dengan 2,57% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021, realisasi investasi terbesar di Kota Sabang adalah di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp33.000.000.000,- dan diikuti dengan sektor Jasa lainnya dengan nilai investasi sebesar Rp5.440.674.000,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kota Sabang terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Peringkat Daya Saing Kota Sabang

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		12 0,016		5 0,648	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	21	11	Peringkat	14	13
Nilai Terstandar	-0,918	-0,277	Nilai Terstandar	-0,207	0,042
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	16	9	Peringkat	2	1
Nilai Terstandar	-0,661	0,348	Nilai Terstandar	1,849	2,477

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kota Sabang berada pada urutan ke 12 dengan nilai terstandar sebesar 0,016. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,648 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 5. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kota Sabang akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Sabang berada pada urutan ke 21 dengan nilai terstandar sebesar -0,918. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB, PDRB industri primer, ekspor dan impor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kota Sabang dapat meningkat drastis sampai peringkat 11 dengan nilai terstandar -0,277.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Sabang berada pada urutan ke 14 dengan nilai terstandar sebesar -0,207. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah pendapatan total Pemda dan pengeluaran Pemda. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kota Sabang dapat meningkat sampai peringkat 13 dengan nilai terstandar 0,042.

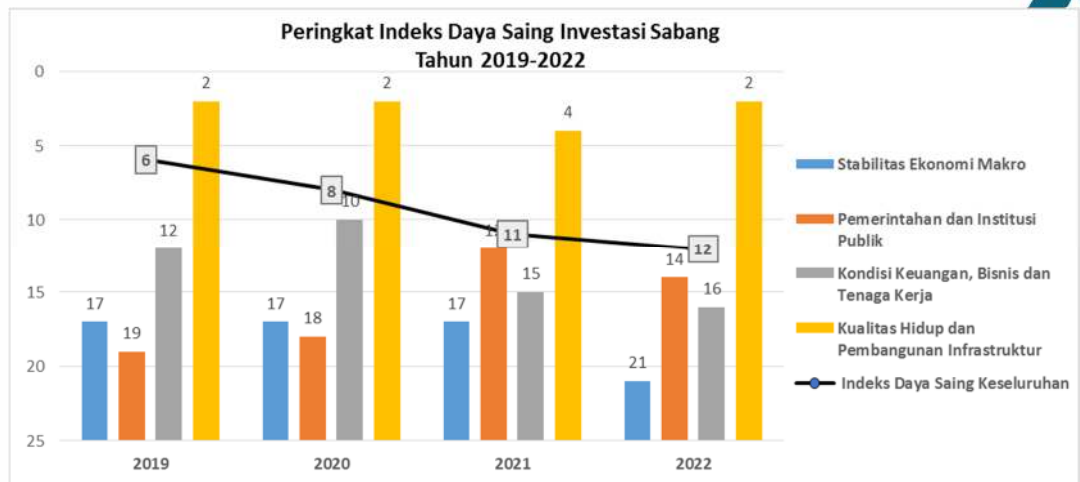
3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Sabang berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,661. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain total pinjaman bank, jumlah kredit bermasalah, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, jumlah pekerja di sektor primer, sekunder dan tersier. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Sabang dapat meningkat drastis sampai peringkat 9 dengan nilai terstandar 0,348.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kota Sabang berada pada urutan ke 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,849. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah penduduk, panjang jalan beraspal, rasio murid per guru (SMA) dan jumlah kejadian bencana alam. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang dapat meningkat sampai peringkat 1 dengan nilai terstandar 2,477.

c. Perbaiki Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kota Sabang dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Sabang yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 12 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

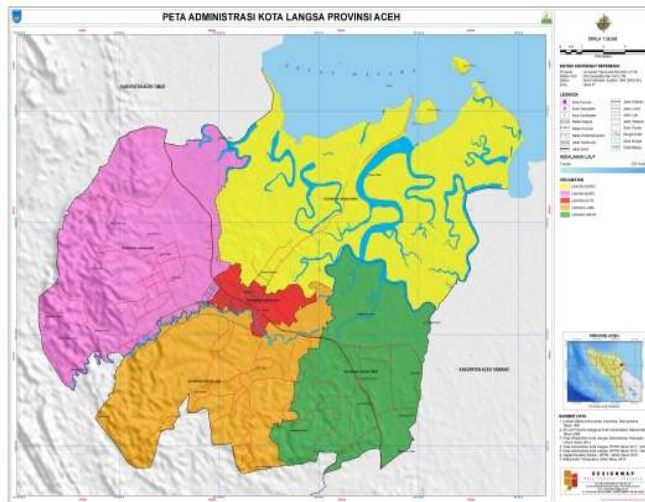
Tabel 2.42 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Sabang

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-1,961	1	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.
Jumlah Penduduk Bekerja	-1,453	2	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Jumlah Angkatan Kerja	-1,441	3	Meningkatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja.
Jumlah Penduduk	-1,360	4	-
Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-1,314	5	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-1,287	6	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
PDRB, nonmineral	-1,241	7	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Ekspor, nonmigas	-1,232	8	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Ekspor	-1,232	9	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,139	10	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-1,097	11	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Pendapatan Total Pemda	-1,079	12	Tingkatkan PAD daerah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pemungutan PAD.
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-1,073	13	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Pengeluaran Pemda	-1,070	14	Perencanaan yang matang dalam mengatur pengeluaran pemerintah daerah.
Impor	-1,063	15	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Impor, nonmigas	-1,063	16	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Jumlah kejadian bencana alam	-1,018	17	Aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk menyiapkan berbagai Langkah antisipasi guna meminilisir resiko bencana.
PDRB Industri Primer	-0,995	18	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri Primer.
Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,979	19	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Total Pinjaman Bank	-0,926	20	Mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur, mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang telah disepakati.

21. Kota Langsa

a. Gambaran Umum



Kota Langsa merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 262.41 km². Hasil dari Sensus Penduduk Tahun 2021 sebanyak 188.878 jiwa, terdiri atas 94.886 jiwa laki-laki, dan 93.992 jiwa perempuan serta rasio jenis kelamin sebesar 101%.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Langsa selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 1.24 triliun rupiah. PDRB Kota Langsa atas dasar harga berlaku secara rata-rata mengalami kenaikan 311 miliar rupiah per tahun. Pada Tahun 2021, PDRB atas dasar harga berlaku Kota Langsa meningkat sebesar 510 miliar rupiah dari 5,27 triliun rupiah menjadi 5,78 triliun rupiah.

Kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan pada Tahun 2021 perekonomian mulai membaik bila dibandingkan dengan awal mula terjadinya pandemi covid pada Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 ekonomi Kota Langsa mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -1,12%. Pertumbuhan ekonomi Langsa yang negatif disebabkan pada Tahun 2020 awal mula terjadinya virus Covid19, dimana banyak sektor ekonomi yang tidak bisa berproduksi secara maksimal karena mengikuti peraturan pemerintah terkait pembatasan jam operasi untuk mencegah penyebaran virus Covid19. Pada Tahun 2021, walaupun masih terdapat pandemi virus Covid19, akan tetapi perekonomian di Kota Langsa mulai bangkit, hal ini di tunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hingga sebesar 4,23%.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Kota Langsa pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp108.896.446.455,-. Total realisasi tersebut setara dengan 1,88% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2016 s.d 2020 realisasi investasi terbesar di Kota Langsa adalah di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai investasi sebesar Rp27.551.563.447,- dan diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai investasi sebesar Rp26.903.229.289,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kota Langsa terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Peringkat Daya Saing Kabupaten Kota Langsa

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		14		5	
Nilai Terstandar		-0,105		0,659	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	11	11	Peringkat	12	7
Nilai Terstandar	-0,407	-0,189	Nilai Terstandar	0,089	0,546
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	12	9	Peringkat	14	1
Nilai Terstandar	0,032	0,276	Nilai Terstandar	-0,132	2,002

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Kota Langsa berada pada urutan ke 14 dengan nilai terstandar sebesar -0,105. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,659 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 5. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Kota Langsa akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Langsa berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar sebesar -0,407. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB, PDRB industri primer, ekspor dan rata-rata penanaman modal domestik dalam 3 tahun terakhir. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kota Langsa dapat meningkat dengan nilai terstandar menjadi -0,189.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Langsa berada pada urutan ke 12 dengan nilai terstandar sebesar 0,089. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pendapatan total Pemda, pengeluaran Pemda dan tingkat kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kota Langsa dapat meningkat drastis sampai peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,546.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

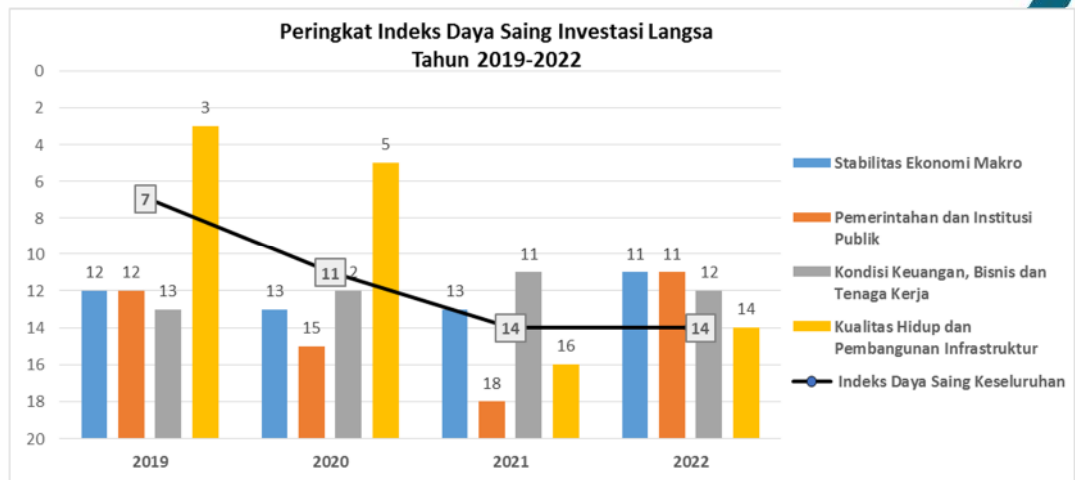
Dilihat dari lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Langsa berada pada urutan ke 12 dengan nilai terstandar sebesar 0,032. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah pekerja di sektor primer, tingkat pengangguran dan produktivitas industri sekunder. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Langsa dapat meningkat sampai peringkat 9 dengan nilai terstandar 0,276.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kota Langsa berada pada urutan ke 14 dengan nilai terstandar sebesar -0,132. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain panjang jalan beraspal, jumlah kendaraan bermotor, kepemilikan rumah, penduduk menggunakan sambungan telepon, rasio murid per guru (SD, SMP dan SMA), rasio gini, rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama dan per jumlah tenaga kesehatan.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Langsa dapat meningkat drastis sampai peringkat 1 dengan nilai terstandar 2,002.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kota Langsa dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Langsa yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 14 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Langsa

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-3,851	1	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	-2,428	2	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Rasio Gini	-1,707	3	Kembangkan kegiatan padat karya; beri insentif untuk kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja; bansos untuk masyarakat miskin.
Persentase kepemilikan rumah	-1,387	4	Tingkatkan program bantuan pembangunan rumah untuk orang tidak mampu.
Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-1,202	5	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-1,159	6	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-1,089	7	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-0,927	8	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-0,861	9	Perekrutan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
PDRB Industri Primer	-0,850	10	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri Primer.

Tingkat Kriminalitas	-0,724	11	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Pendapatan Total Pemda	-0,721	12	Tingkatkan PAD daerah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pemungutan PAD.
Persentase Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0,716	13	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Pengeluaran Pemda	-0,713	14	Perencanaan yang matang dalam mengatur pengeluaran pemerintah daerah.
Tingkat Pengangguran	-0,591	15	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Produktivitas industri Sekunder	-0,559	16	Implementasi industri sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.
Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,408	17	Meningkatkan promosi investasi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,394	18	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-0,373	19	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Ekspor, nonmigas	-0,356	20	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.

22. Kota Lhokseumawe

a. Gambaran Umum



Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 181,06 km². Menurut data BPS pada Tahun 2021, Kota Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk sebanyak 189.941 orang.

Nilai PDRB ADHK Lhokseumawe pada Tahun

2021 mencapai 7,25 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 0,66 triliun rupiah dari Tahun 2017. PDRB ADHK tanpa migas pada Tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,55 triliun rupiah dari sebesar 5,52 triliun rupiah pada Tahun 2017 menjadi 6,07 triliun rupiah pada Tahun 2021. Selama 5 tahun terakhir (2017-2021) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan dari pada kenaikan karena faktor produktivitas

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.512.164.629.001,-. Total investasi tersebut setara dengan 26,66% PDRB Tahun 2021.

Berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Lhokseumawe, ada 3 sektor yang menjadi fokus pengembangan penanaman modal di Kota Lhokseumawe yaitu Pengembangan argoindustri (pengembangan komoditas tanaman pangan, Pengembangan komoditas peternakan, perikanan dan kelautan), Pengembangan pariwisata dan Pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kota Lhokseumawe adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai investasi Rp2.458.391.654.507,- dan diikuti dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai investasi sebesar Rp24.899.629.814,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kabupaten Kota Lhokseumawe terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.45 Peringkat Daya Saing Kabupaten Kota Lhokseumawe

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		6 0,436		3 1,283	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	4	3	Peringkat	17	7
Nilai Terstandar	1,428	1,522	Nilai Terstandar	-0,568	0,528
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	6	3	Peringkat	9	1
Nilai Terstandar	0,576	0,939	Nilai Terstandar	0,308	2,142

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,436. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,283 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 3. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kabupaten Kota Lhokseumawe akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 4 dengan nilai terstandar sebesar 1,428. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB industri primer dan rata-rata penanaman modal asing dalam 3 tahun terakhir. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Kota Lhokseumawe akan meningkat sampai peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,522.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar sebesar -0,568. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pendapatan total Pemda, pengeluaran Pemda dan tingkat kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kota Lhokseumawe dapat meningkat drastis sampai peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,528.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

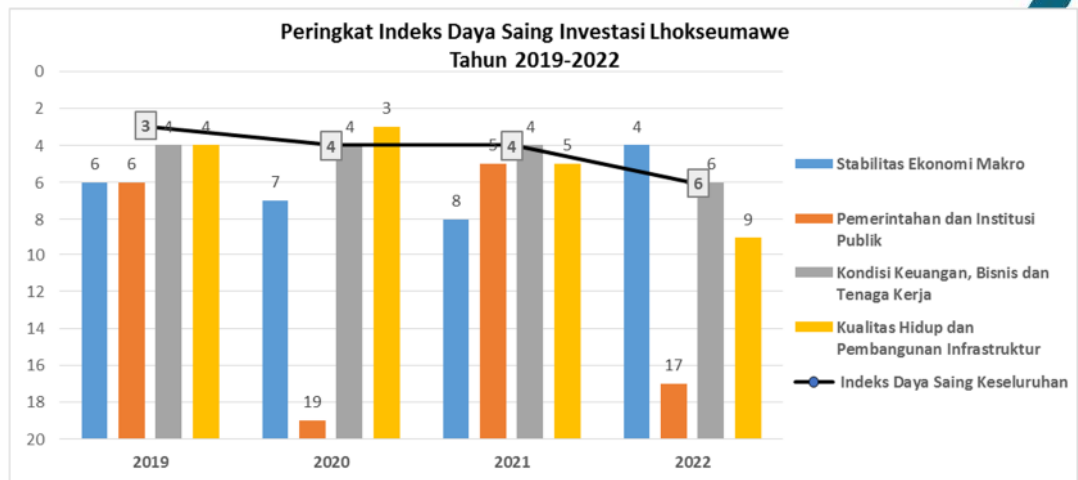
Dilihat dari lingkup kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,576. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah penduduk bekerja, jumlah pekerja di sektor primer dan tingkat pengangguran. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dapat meningkat menjadi peringkat 3 dengan nilai terstandar 0,939.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 9 dengan nilai terstandar sebesar 0,308. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan jumlah penduduk, panjang jalan beraspal, jumlah kendaraan bermotor, jumlah rumah tangga dengan jaringan pipa air, kepemilikan rumah, akses internet di rumah, rasio murid per guru (SD, SMP dan SMA), rasio gini dan rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan pembangunan Infrastruktur Kota Lhokseumawe dapat meningkat drastis sampai peringkat 1 dengan nilai terstandar 2,142.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kota Lhokseumawe dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Lhokseumawe yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 6 akan meningkat menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

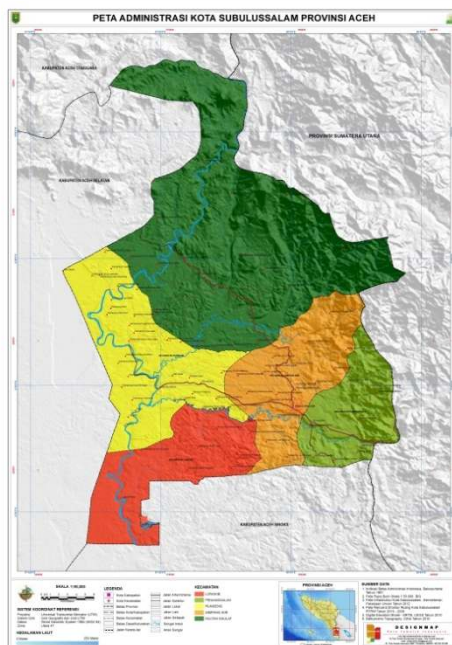
Tabel 2.46 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Lhokseumawe

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	-2,959	1	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Tingkat Pengangguran	-2,236	2	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Tingkat Kriminalitas	-1,768	3	Mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.
Pertumbuhan Penduduk	-1,509	4	Pengembangan program transmigrasi.
Panjang Jalan Beraspal (total)	-1,155	5	Tingkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-1,078	6	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Pendapatan Total Pemda	-0,946	7	Tingkatkan PAD daerah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pemungutan PAD.
Pengeluaran Pemda	-0,937	8	Perencanaan yang matang dalam mengatur pengeluaran pemerintah daerah.
Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-0,863	9	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
PDRB Industri Primer	-0,693	10	Dorong pengembangan industri sekunder dengan pemberian insentif; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk industri Primer.

Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,671	11	Tingkatkan alokasi dana untuk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM); lakukan penguatan kelembagaan SPAM.
Persentase kepemilikan rumah	-0,538	12	Tingkatkan program bantuan pembangunan rumah untuk orang tidak mampu.
Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-0,485	13	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-0,471	14	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
Akses Internet di Rumah	-0,412	15	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Jumlah Penduduk	-0,301	16	-
Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-0,294	17	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,294	18	Meningkatkan promosi investasi.
Rasio Gini	-0,292	19	Kembangkan kegiatan padat karya; beri insentif untuk kegiatan usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja; bansos untuk masyarakat sangat miskin.
Jumlah Penduduk Bekerja	-0,278	20	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.

23. Kota Subulussalam

a. Gambaran Umum



Kota Subulussalam merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.391 km². Menurut data BPS pada Tahun 2020 Kota Subulussalam memiliki jumlah penduduk sebanyak 92.671 orang.

Nilai PDRB Subulussalam atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 mencapai 2.123 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 319 miliar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai 1.804 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi, dan adanya proses pemulihan ekonomi

during the Covid-19 pandemic.

Nilai PDRB Subulussalam atas dasar harga konstan 2010, mencapai 1.439 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 54 miliar rupiah jika dibandingkan dengan 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi positif sebesar 3,87% dari tahun sebelumnya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Subulussalam pada Tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,79% (naik dari sebelumnya sebesar 21,48% di Tahun 2020)

Jumlah realisasi investasi Kota Subulussalam pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.057.804.050. Total investasi tersebut setara dengan 0,57% PDRB Tahun 2021. Berdasarkan data managerial PMA dan PMDN Tahun 2021 realisasi investasi terbesar di Kota Subulussalam adalah di sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai investasi sebesar Rp6.354.500.000,- dan diikuti dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai investasi sebesar Rp3.740.700.000,-.

Angka realisasi investasi tersebut masih belum mencerminkan iklim investasi dan Peringkat daya saing investasi Kota Subulussalam terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Peringkat Daya Saing Kabupaten Subulussalam

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		23 -1,179		15 -0,361	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	15	9	Peringkat	21	14
Nilai Terstandar	-0,552	-0,005	Nilai Terstandar	-1,270	-0,228
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	18	15	Peringkat	23	17
Nilai Terstandar	-1,025	-0,561	Nilai Terstandar	-1,869	-0,652

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kota Subulussalam berada pada urutan ke 23 dengan nilai terstandar sebesar -1,179. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi -0,361 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi 15. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi diharapkan target investasi di Kota Subulussalam akan tercapai pada tahun-tahun mendatang.

b. Kondisi Daya Saing Investasi

1) Kondisi Ekonomi Makro

Dilihat dari lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Subulussalam berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,552. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah PDRB, ekspor dan impor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Stabilitas Ekonomi dengan nilai terstandar -0,005.

2) Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Subulussalam berada pada urutan ke 21 dengan nilai terstandar sebesar -1,270. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pendapatan total Pemda, pengeluaran Pemda dan evaluasi kinerja Pemda. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Pemerintahan dan Institusi Kota Subulussalam dapat meningkat drastis sampai peringkat 14 dengan nilai terstandar -0,228.

3) Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

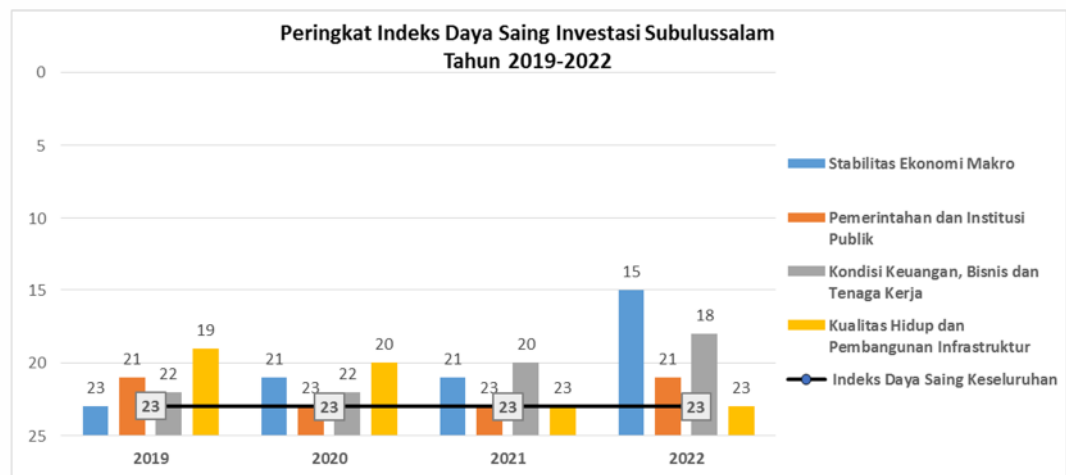
Dilihat dari lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Subulussalam berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar -1,025. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, jumlah pekerja di sektor sekunder dan tersier. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Subulussalam dapat meningkat sampai naik pada peringkat 15 dengan nilai terstandar -0,561.

4) Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kota Subulussalam berada pada urutan ke 23 dengan nilai terstandar sebesar -1,869. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain penduduk yang menggunakan telepon genggam, akses internet dengan telepon genggam, tingkat buta huruf (dewasa), rata-rata lama sekolah, rasio murid per guru (SMP), indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup saat lahir.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Subulussalam dapat meningkat drastis sampai peringkat 17 dengan nilai terstandar -0,652.

c. Perbaikan Daya Saing Investasi



Berdasarkan skenario *What-If*, jika 20 indikator daya saing terendah Kota Subulussalam dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Subulussalam yang pada Tahun 2022 berada pada posisi 23 akan meningkat menjadi peringkat 15 pada tahun berikutnya. Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan sebagaimana disebutkan pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Daftar 20 Indikator Daya Saing Terendah & Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kota Subulussalam

Indikator	Nilai Terstandar	Peringkat	Rekomendasi Kebijakan
Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,928	1	Tingkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu hamil dan menyusui.
Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-1,809	2	Pemerataan pendistribusian guru untuk sekolah-sekolah.
Akses Internet dengan Telepon Genggam	-1,672	3	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-1,524	4	Peningkatan literasi digital mendukung pemanfaatan teknologi informasi.
Indeks Pembangunan Manusia	-1,372	5	Sinergitas antara Pemprov dan Kab/Kota untuk peningkatan angka IPM; manfaatkan Tehnologi Informasi dan Komukasi (TIK) untuk meningkatkan penyetaraan.
Rata-rata Lama Sekolah	-1,297	6	Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang Pendidikan.
Pendapatan Total Pemda	-1,226	7	Tingkatkan PAD daerah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pemungutan PAD.
Pengeluaran Pemda	-1,216	8	Perencanaan yang matang dalam mengatur pengeluaran pemerintah daerah.
Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,205	9	Memperluas program pendidikan keaksaraan, mengembangkan dan pemeliharaan kemampuan literasi warga, hingga mengakselerasi layanan pada program pada daerah yang padat buta aksaranya.
Jumlah Penduduk Bekerja	-1,193	10	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Evaluasi Kinerja Pemda	-1,182	11	Tingkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Jumlah Angkatan Kerja	-1,178	12	Meningkatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja.
Ekspor, nonmigas	-1,165	13	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Ekspor	-1,165	14	Dorong peningkatan ekspor dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
PDRB, nonmineral	-1,127	15	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.

Impor	-1,115	16	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Impor, nonmigas	-1,115	17	Tingkatkan aktivitas ekspor/ impor dengan penyediaan sarana dan prasarana ekspor/ impor di area pelabuhan.
Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-1,081	18	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,045	19	Dorong peningkatan aktivitas dan produksi sektor unggulan daerah dengan pemberian insentif; promosi produk daerah; fasilitasi akses keuangan dan akses pasar untuk komoditas ekspor.
Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-1,042	20	Menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat daya saing investasi 23 Kabupaten/Kota se Aceh yang terdiri dari 4 (empat) lingkup (Stabilitas Ekonomi Makro; Perencanaan Pemerintah dan Institusi; Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja; dan Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur), 12 Sublingkup dan 76 indikator lainnya yang merujuk pada model yang dikembangkan oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI), dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan pengolahan data, Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2022, terdapat 13 Kabupaten/Kota memperoleh nilai indeks daya saing investasi dengan nilai positif, antara lain Banda Aceh (1,678); Aceh Besar (1,359); Aceh Utara (0,818); Bireuen (0,753); Aceh Barat (0,459); Lhokseumawe (0,436); Aceh Tengah (0,373); Nagan Raya (0,330); Pidie (0,273); Bener Meriah (0,181); Aceh Selatan (0,031); Sabang (0,016); dan Aceh Jaya (0,007); dibandingkan Tahun 2021 yang hanya 11 Kabupaten/Kota.
2. Untuk Indeks Daya Saing Investasi, Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi berhasil memperoleh peringkat 1 sejak Tahun 2019 s.d Tahun 2022, dengan nilai terstandar 1,678 (2022).
3. Untuk Indeks Daya Saing Investasi, Kota Subulussalam menduduki peringkat paling rendah sejak Tahun 2019 s.d Tahun 2022, dengan nilai terstandar -1,179 (2022). Khusus Pemerintah Kota Subulussalam bersama pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperbaiki berbagai kelemahan indikator Indeks Daya Saing Investasi untuk dapat bersaing dengan Kabupaten/Kota lainnya.
4. Dari 76 indikator Indeks Daya Saing Investasi, khususnya untuk indikator PDRB, ekspor non migas, infrastruktur jalan beraspal, pelabuhan, dan angka partisipasi sekolah dasar cenderung menunjukkan nilai terstandar negatif di 23 Kabupaten/Kota. Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai kebijakan dan strategi untuk meningkatkan nilai indikator tersebut menjadi nilai terstandar positif melalui pembangunan sarana dan prasarana di daerah.
5. Untuk indikator Opini Audit LKPD Pemerintah Daerah menjadi indikator dengan nilai terstandar positif (terbaik di seluruh kabupaten/kota). Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di Kabupaten/Kota semakin membaik, sehingga capaian tersebut perlu terus dipertahankan.

6. Dilihat dari 4 lingkup Indeks Daya Saing Investasi Tahun 2022, khusus lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur menjadi lingkup dengan nilai terstandar negatif terbanyak untuk seluruh Kabupaten/Kota. Dapat disimpulkan bahwa kualitas infrakstruktur dan sosial di 23 kabupaten/kota masih relatif kurang baik.

3.2. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi dari kesimpulan di atas, yang terkait tingkat daya saing investasi 23 Kabupaten/Kota se Aceh yang menunjukkan hasil yang positif dan negatif:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mempedomani Simulasi What-If dalam rangka melakukan perbaikan dan meningkatkan daya saing investasi di wilayahnya masing-masing.
2. Pemerintah Aceh perlu menetapkan kebijakan berbasis kinerja investasi untuk memacu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan daya saing investasi di wilayahnya masing-masing.
3. Perbaikan secara menyeluruh dari daya saing investasi kabupaten/kota akan mendorong perbaikan daya saing investasi Aceh, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan daya tarik investasi Aceh.
4. Penyusunan Indeks Daya Saing Investasi perlu dilakukan secara tahunan dalam rangka memantau (*tracking*) tren perkembangan daya saing investasi 23 Kabupaten/Kota, sekaligus menciptakan semangat untuk berkompetisi secara sehat dan positif antar kabupaten/kota se Aceh.